



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

INDEF

**PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
(MBTK)**



PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN (MBTK)

Kerjasama
Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan
dengan
Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF)

Jakarta, Desember 2023

SAMBUTAN

Tujuan utama pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan di suatu wilayah tertentu. Dengan merancang KEK, pemerintah bertujuan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang diutamakan. Selain itu, KEK juga membutuhkan perencanaan strategis terkait kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Oleh karena itu, Buku proyeksi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus menjadi landasan strategis yang penting dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ketenagakerjaan.

Buku ini tidak hanya merinci kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang dinamika pasar kerja di masa mendatang. Dengan demikian, pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat bersinergi untuk memastikan ketersediaan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar, merancang kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang efektif, mengidentifikasi potensi investasi, dan merancang program pelatihan yang relevan.

Peran perencanaan tenaga kerja dalam buku ini tak hanya melibatkan pemetaan kebutuhan skill, tetapi juga menyoroti pentingnya penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global. Keberhasilan kawasan ekonomi khusus sangat tergantung pada kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan dinamis tersebut. Kolaborasi antara stakeholder menjadi inti dari upaya ini. Kami menyadari bahwa kerjasama erat

antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus. Hanya dengan bersama-sama, kita dapat merancang solusi yang holistik dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti fenomena *mismatch* di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus, di mana terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan tuntutan pasar. Analisis mendalam dan rekomendasi praktis yang terdapat dalam buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi upaya mengatasi *mismatch* tersebut.

Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga Buku Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga katalisator perubahan positif dalam penguatan ketenagakerjaan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Jakarta, Desember 2023
Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan



Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, M.Eng

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah yang memadukan pertimbangan potensi daerah dengan investasi di bidang industri. Salah satu kawasan ekonomi yang saat ini sedang dikembangkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus MBTK. Pengembangan KEK MBTK ini ditargetkan dapat menyerap investasi hingga Rp34,4 Triliun di tahun 2025 dan mampu menyerap 55.700 tenaga kerja. Jumlah realisasi investasi yang berada di KEK MBTK pada Triwulan III Tahun 2023 tercatat baru sebesar Rp92,8 miliar. Realisasi penyerapan tenaga kerja hingga Triwulan III Tahun 2023 juga masih terbatas hanya sebanyak 169 orang.

Kawasan KEK MBTK dirancang sebagai kawasan industri hilir dari CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pembangunan KEK ini juga menjadi upaya untuk mengubah sektor perekonomian daerah dari yang saat ini masih bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) khususnya batubara menuju pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) dengan mengembangkan potensi industri perkebunan dan pertanian, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk memberikan informasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di KEK MBTK serta memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di dalam kawasan. Selain itu, dokumen ini disusun untuk menganalisis dampak pembangunan KEK MBTK terhadap kesempatan kerja. Dokumen ini diakhiri dengan

rekomendasi strategi penyiapan kebutuhan tenaga kerja di KEK MBTK.

Berdasarkan hasil analisis dampak pembangunan KEK BAT, ketika terjadi pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi) maka akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor Sektor ekonomi yang terdampak tumbuh paling tinggi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dilanjutkan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan; sektor real estate, serta sektor pengadaan listrik dan gas. Selain itu sektor-sektor lain pada umumnya juga mengalami peningkatan output.

Pembangunan KEK MBTK juga akan berdampak terhadap kesempatan kerja berdasarkan sektor. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan output maka serapan tenaga kerja juga sejalan dengan peningkatan tersebut. Masih kecilnya investasi yang masuk ke KEK MBTK mengakibatkan dampak yang dihasilkan terhadap kesempatan juga tidak terlalu besar. Dampak terbesar terhadap kesempatan kerja terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran yang akan tumbuh sektor 0,63 persen. Kemudian diikuti kesempatan kerja pada sektor lainnya, seperti jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, dan transportasi pergudangan.

Berdasarkan capaian kinerja investasi di KEK MBTK dan asumsi skenario realisasi investasi, maka diperoleh hasil proyeksi investasi menggunakan asumsi moderat (skenario rendah) pada 2028 diperkirakan mencapai Rp6,88 triliun. Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja hingga, diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 14.187 orang di tahun 2028 pada

skenario rendah. Kondisi tersebut juga masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam masterplan KEK MBTK.

Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan diploma, universitas, dan SMTA Kejuruan. Proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa jabatan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan adalah Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi. Selanjutnya banyak juga dibutuhkan jabatan lain seperti teknisi dan asisten profesional. Kebutuhan pekerja kasar di KEK MBTK juga masih tinggi berkisar 16,67 persen.

Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja di KEK MBTK, diantaranya: Terdapat permasalahan kelembagaan yang menghambat perkembangan KEK MBTK, Belum lengkapnya fasilitas pendukung yang ada di dalam kawasan, terbatasnya ketersediaan lembaga pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi, belum sinkornnya pelatihan yang dilakukan, dan kualitas lulusan yang kalah bersaing.

Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi strategi antara lain optimalisasi investasi yang harus segera dilakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan serapan tenaga kerja di KEK MBTK. Perlu memperbanyak SMTA kejuruan dan pendidikan tinggi dengan kurikulum yang sesuai dengan potensi KEK MBTK. Perlu mengembangkan SKKNI berbasis kebutuhan dunia usaha (demand based), serta mengembangkan kurikulum pelatihan yang link and match, melakukan harmonisasi dini dengan pelaku usaha dan calon investor untuk mempersiapkan pelatihan.

Pengembangan program pelatihan peningkatan produktivitas di BPVP (BLK) juga perlu dilakukan secara lebih masif. Selain itu juga perlu memperbanyak kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP (BLK) dan institusi pendidikan.

PUSRENAKER

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
1.4 Output	3
1.5 Ruang Lingkup	4
1.6 Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN METODE.....	7
2.1. Teori Pengembangan Kawasan Ekonomi	7
2.2. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus	13
2.3. Metode Penyusunan Proyeksi dan Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Perekonomian Wilayah	18
BAB 3. PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN INVESTASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR	21
3.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah	21
3.2. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur	23
3.2 Kinerja Investasi di Kabupaten Kutai Timur	47
BAB 4. GAMBARAN UMUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS MBTK	52
5.1. Gambaran Umum KEK MBTK	52

5.2. Investasi di KEK MBTK	55
5.3. Tenaga Kerja KEK MBTK	57
BAB 5. DAMPAK PEMBANGUNAN KEK MBTK DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA	59
5.1. Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perkonomian dan Perluasan Kesempatan Kerja	59
5.2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di KEK MBTK ..	63
5.3. Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja di KEK MBTK	69
BAB 6. PENUTUP	72
6.1. Kesimpulan	72
6.2. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai PDRB Menurut Sektor Usaha Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022	22
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Lulusan Peserta Didik SMK Menurut Jurusan di Kabupaten Kutai Timur.....	41
Tabel 3.3 Pelatihan yang Dilakukan OPD Kabupaten Kutai Timur	45
Tabel 3.4 Realisasi PMA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Menurut Sektor (Miliar Rp).....	49
Tabel 3.5 Realisasi PMDN Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Menurut Sektor (Miliar Rp).....	50
Tabel 5.1 Skenario Proyeksi Investasi Pada KEK MBTK.....	64
Tabel 5.2 Skenario Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KEK MBTK (Asumsi Moderat).....	67
Tabel 5.3 Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Di KEK MBTK (Asumsi Moderat)	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Kegiatan Proyeksi Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus.....	6
Gambar 2.1 Analisis Kawasan dengan Pendekatan Ilmu Wilayah.....	10
Gambar 2.2 Kerangka Tipologi Kawasan.....	14
Gambar 2.3 Tipologi Fungsional Kawasan Ekonomi Khusus	15
Gambar 2.4 Tahapan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	17
Gambar 3.1 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	24
Gambar 3.2 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Kelamin 2018-2022	25
Gambar 3.3 Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022	26
Gambar 3.4 Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Tingkat Pendidikan 2018-2022	27
Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	28
Gambar 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022.....	29

Gambar 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Tingkat Pendidikan 2018-2022.....	30
Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	31
Gambar 3.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Kelamin 2018-2022	32
Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022.....	33
Gambar 3.11 Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	34
Gambar 3.12 Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	35
Gambar 3.13 Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Jabatan Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	36
Gambar 3.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur 2018-2022.....	37
Gambar 3.15 Perkembangan TPT Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	38
Gambar 3.16 Perkembangan TPT Menurut Golongan Umur Kabupaten Kutai Timur 2018-2022	39
Gambar 3.17 TPT Kabuptaten Kutai Timur Tahun 2018-2022 Menurut Tingkat Pendidikan	40
Gambar 3.18 Realisasi Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)	48

Gambar 3.19 Realisasi PMA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Menurut Asal Negara (Miliar Rp)	49
Gambar 4.1 Lokasi KEK MBTK	53
Gambar 4.2 Masterplan KEK MBTK.....	55
Gambar 5.1 Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perubahan Output Sektoral	60
Gambar 5.2 Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perubahan Kesempatan Kerja Sektoral	62
Gambar 5.3 Proyeksi Investasi di KEK MBTK.....	65
Gambar 5.4 Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK MBTK	66

PUSRENAKER

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus disahkan dengan Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pada Undang Undang tersebut disebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, melalui peningkatan penanaman modal dengan menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan Ekonomi Khusus dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.¹

Salah satu Kawasan Ekonomi Khusus yang sedang dikembangkan adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang termasuk ke dalam salah satu KEK industri. Pengembangan KEK MBTK di wilayah Kutai Timur menjadi

¹ UU No.39 Tahun 2009

langkah mewujudkan pembangunan Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri turunan kelapa sawit *oleochemical* serta mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut.

Wilayah Kutai Timur juga memiliki potensi kekayaan sumber daya alam lainnya seperti minyak, gas, mineral, dan batu bara. Selain itu, wilayahh terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur interkoneksi Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan- Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

Wilayah Kutai Timur tengah dipersiapkan sebagai pusat pengolah kelapa sawit dan produk turunannya, industri mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan telah direncanakan dibangunnya pelabuhan internasional serta penanganan dan peningkatan jalan akses yang dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta distribusi hasil industri Kutai Timur. Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investor khususnya tenaga kerja dengan keahlian spesifik di bidang hilirisasi kelapa sawit, karet, kayu dan energi sehingga perlu didukung adanya ketersediaan tenaga kerja berkualitas di Kabupaten Kutai Timur.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari kegiatan penyusunan dokumen ini adalah:

1. Menganalisis kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
2. Menyusun proyeksi permintaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
3. Memperkirakan dampak pembangunan kawasan terhadap perluasan kesempatan kerja.
4. Menyusun strategi penyiapan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.

1.3 Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Mengetahui kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
2. Mengetahui proyeksi permintaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
3. Mengetahui dampak pembangunan kawasan terhadap perluasan kesempatan kerja
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.

1.4 Output

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Dokumen informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
2. Dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
3. Informasi mengenai dampak Pembangunan KEK MBTK terhadap Kesempatan Kerja.
4. Dokumen yang berisi rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dilakukan di KEK MBTK.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah:

1. Analisis kondisi ketersediaan tenaga kerja dilakukan pada KEK MBTK.
2. Analisis proyeksi permintaan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK.
3. Penyusunan dampak pembangunan kawasan terhadap perluasan kesempatan kerja.
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dilakukan di KEK MBTK.

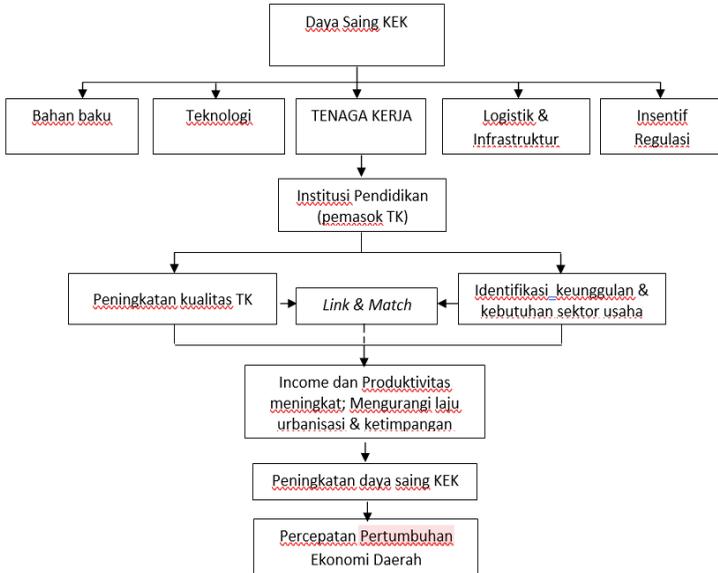
1.6 Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa faktor yang membentuk daya saing kawasan yaitu bahan baku, teknologi, tenaga kerja, logistik & infrastruktur, dan insentif & regulasi. Faktor tenaga kerja ini yang akan menjadi objek studi analisis.

Tenaga kerja yang terserap mempunyai latar pendidikan dan keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan dan lembaga ketenagakerjaan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Strategi yang kuat dibutuhkan untuk mempertemukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih ini dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Dengan data perkiraan penyerapan tenaga kerja di setiap KEK, dapat diperoleh gambaran keahlian yang dibutuhkan dan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan (dengan masing-masing keahlian yang dibutuhkan). Setiap kebutuhan *skill* tenaga kerja mengacu pada kegiatan utama di dalam KEK tersebut. Kondisi saat ini terkait ketersediaan institusi pelatihan untuk menunjang ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Kegiatan Proyeksi Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: INDEF, 2023

BAB 2. STUDI PUSTAKA DAN METODE

2.1. Teori Pengembangan Kawasan Ekonomi

Pengembangan kawasan merupakan bagian dari konsep pembangunan wilayah. Kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mirzayaputra, 2021).

Lebih lanjut Soedarso (2001, dalam Mirzaya, 2021) mengemukakan bahwa pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya pembangunan wilayah atau daerah dan sumber daya (alam, manusia, buatan dan teknologi) secara optimal, efisien, dan efektif yang dilakukan dilakukan dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi dan mengakumulasikan berbagai kegiatan investasi tertentu yang dapat menjadi pemicu (trigger) bagi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, yang keseluruhannya diwadahi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun kawasan.²Pengembangan kawasan ini

² Budiono Soedarso. 2001. Pengembangan Promosi dan Investasi Kawasan (Teritorial Marketing) Sebagai Wujud Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Estat* Vol. 3 No. 1

merupakan bagian dari konsep pembangunan wilayah dengan pendekatan klaster.

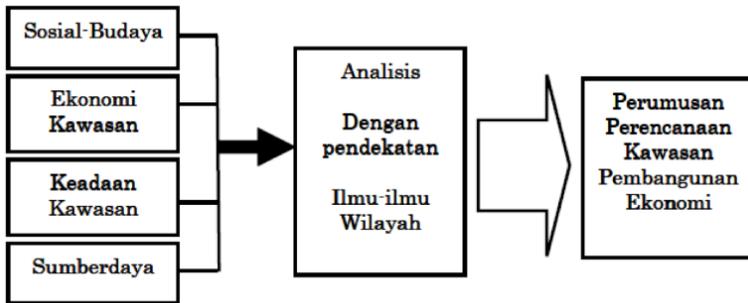
Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masing-masing (Mirzayaputra, 2021).

Tujuan dari pengembangan kawasan adalah (Mirzayaputra, 2021): 1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya; 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat; 4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah; 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah; 6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kawasan adalah (Mirzayaputra, 2021): 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan; 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global, sesuai dengan

kemajuan teknologi, dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah; 3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi, agar mampu bekerjasama secara efektif, efisien dan berdaya saing global; 4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan dan hortikultura, kelembagaan, dan budaya local; 5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelakunya sesuai dengan semangat otonomi daerah; 6. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya para petaninya, dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak; dan 7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Tom Edward MN (1999, dalam Mirzayaputra, 2021), kawasan adalah merupakan unit geografis dengan batas-batas tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain secara fungsional ini dikembangkan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam secara berkeseimbangan dan berkesinambungan.



Gambar 2.1 Analisis Kawasan dengan Pendekatan Ilmu Wilayah

Sumber: Mirzayaputra, 2021

Menurut Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan dibagi menjadi:

- a. **Kawasan lindung** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- b. **Kawasan budi daya** adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- c. **Kawasan perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- d. **Kawasan agropolitan** adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

- e. **Kawasan perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- f. **Kawasan metropolitan** adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- g. **Kawasan megapolitan** adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
- h. **Kawasan strategis nasional** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- i. **Kawasan strategis provinsi** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

- j. **Kawasan strategis kabupaten/kota** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Lebih lanjut kawasan strategis dijelaskan pada Undang Undang tersebut, bahwa kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut:

1. Kepentingan pertahanan dan keamanan, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
2. Pertumbuhan ekonomi, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
3. Sosial dan budaya, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi

warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.

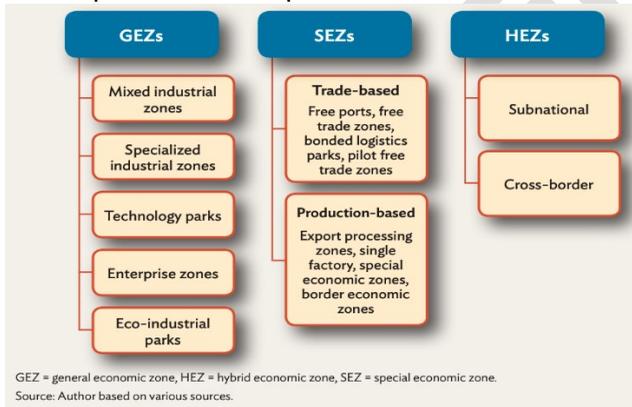
4. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
5. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo.

Sementara itu nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2.2. Konsep Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut UNCTAD (2019), Zona Ekonomi Khusus merupakan wilayah yang dibatasi secara geografis dimana pemerintah memfasilitasi kegiatan industri melalui insentif fiskal dan peraturan serta dukungan infrastruktur, yang banyak digunakan di sebagian besar negara berkembang dan negara maju. Meskipun kinerja banyak zona tetap di bawah ekspektasi, gagal menarik investasi yang signifikan

atau menghasilkan dampak ekonomi di luar batasnya, zona baru terus dikembangkan, karena pemerintah semakin bersaing untuk aktivitas industri seluler internasional. Pembuat kebijakan tidak hanya menghadapi tantangan tradisional untuk membuat KEK berhasil, termasuk kebutuhan akan fokus strategis yang memadai, model peraturan dan tata kelola, dan alat promosi investasi, tetapi juga tantangan baru yang dibawa oleh keharusan pembangunan berkelanjutan, revolusi industri baru, dan perubahan pola ekonomi. produksi internasional.



Gambar 2.2 Kerangka Tipologi Kawasan

Sumber: Aggarwal, Aradhna – ADB (2022)

Sementara itu Aggarwal, Aradhna – ADB (2022) mengemukakan bahwa KEK adalah berbagai zona ekonomi yang berbeda dengan rezim hukum khusus dan lingkungan kelembagaan yang berbeda dari ekonomi lainnya. Mereka dibentuk untuk mengatasi defisit kelembagaan di negara-negara berkembang (Aggarwal 2010).

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Trade-Based SEZs	
Free ports	<ul style="list-style-type: none"> • Free ports are a special kind of maritime port or airport where normal tax and customs rules do not apply.
Free trade zone (FTZ)	<ul style="list-style-type: none"> • An FTZ is a small, enclosed area carved out in or adjacent to ports or airports, offering warehousing, storage, and distribution facilities for trade, transshipment, and reexport operations, and located in the ports of entry or airports (UNCTAD 2019).
Bonded logistics parks (BLPs)	<ul style="list-style-type: none"> • BLPs are essentially a variant of free trade zones, offering a range of transport and logistics services to trade, including swift, customer-oriented just-in-time services and value-added logistics services to reduce inventory and raw material procurement costs.
Digital free trade zones (DFTZ)	<ul style="list-style-type: none"> • A DFTZ aims at providing physical and virtual space for SMEs to grow through cross-border e-commerce activities. It is supported by logistics centers set up in selected locations.
Production-Based SEZs	
Export processing zones (EPZs)	<ul style="list-style-type: none"> • A first-generation EPZ is a relatively small, geographically separated area within a country to attract export-oriented processing activity by offering favorable investment and trade conditions. It provides for importing goods to be used in the production of exports on a bonded, duty-free basis. • Second-generation EPZs are relatively larger and more sophisticated in terms of the composition of export processing activities, services, and facilities offered than the traditional ones.
Single factory EPZs	<ul style="list-style-type: none"> • EPZs may be promoted as a single firm or factory that is a designated enterprise with EPZ benefits. Mexico's maquilas and Mauritius's EPZs are well-known examples of single factory zones.
Special economic zones (SEZs)	<ul style="list-style-type: none"> • SEZs are mega open industrial towns spread over several square kilometers. The key features of SEZs are that they accommodate all activities, including tourism and retail sales, and permit people to reside on-site with an elaborate on-site social infrastructure. • Second-generation SEZs are more specialized and more complex than first-generation SEZs.
Special border economic zones (SBEZs)	<ul style="list-style-type: none"> • First introduced in Mexico (on US–Mexico border) in the early 1960s in the form of maquiladoras, border economic zones are set up to exploit comparative advantages of border areas that arise due to their climatic conditions, factor endowment, spatial proximity to foreign markets, and the relatively high potential for developing cross-border backward and forward linkages and regional cooperation. • Cross-border economic zones (CBEZs) are established by integrating border economic zones on both sides of the border to catalyze economic activity and promote regional cooperation. ADB supports the development of Hekou–Lao Cai and Pingxiang–Dong Dang CBEZs on the PRC–Viet Nam border.

ADB = Asian Development Bank, PRC = People's Republic of China, SMEs = small and medium-sized enterprises, UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development, US = United States.

Sources: Author based on the existing literature; and UNCTAD. 2019. *World Investment Report 2019: Special Economic Zones*. Geneva.

Gambar 2.3 Tipologi Fungsional Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: Aggarwal, Aradhna – ADB (2022)

Biasanya, KEK didirikan untuk perusahaan berorientasi ekspor, khususnya investasi asing, untuk

menawarkan kepada mereka rezim peraturan khusus untuk kegiatan ekspor dengan area pabean terpisah, manfaat bebas bea, prosedur yang disederhanakan, dan otoritas manajemennya sendiri (Akinci dan Crittle 2008). Namun KEK juga dapat menargetkan kegiatan substitusi impor atau investasi di industri prioritas. Di dunia sekarang ini, mereka telah menjadi alat penting bagi negara berkembang untuk terhubung ke rantai nilai global (GVC). Menurut Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) (2019), 147 negara telah mendirikan hampir 5.400 KEK di dalam perbatasan mereka dan lebih dari 500 sedang dalam proses. Seiring waktu, KEK telah berkembang menjadi berbagai bentuk, tergantung tujuannya.

Sebuah negara cenderung mengadopsi jenis KEK tertentu sesuai dengan tahap perkembangannya. Pendatang relatif baru untuk program KEK, seperti banyak ekonomi di Afrika, menggunakan KEK untuk memulai manufaktur, industrialisasi, dan ekspor. Banyak ekonomi yang lebih maju menggunakan zona untuk merangsang peningkatan industri. Dalam ekonomi transisi, zona yang berfokus pada teknologi adalah penting (UNCTAD, 2019). Berikut ini adalah tahapan pengadopsian Kawasan Ekonomi Khusus.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

	Zone policy objectives	Prevalent zone types
High-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Provide an efficient platform for complex cross-border supply chains • Focus on avoiding distortions in the economy 	<ul style="list-style-type: none"> • Logistics hubs free zones only (not industrial free zones) • Innovation and new industrial revolution objectives pursued through science parks without separate regulatory framework, or though incentives not linked to zones
Upper-middle-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Support transition to services economy • Attract new high-tech industries • Focus on upgrading innovation capabilities 	<ul style="list-style-type: none"> • Technology-based zones (e.g. R&D, high-tech, biotech) • Specialized zones aimed at high value added industries or value chain segments • Services zones (e.g. financial services)
Middle-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Support industrial upgrading • Promote GVC integration and upgrading • Focus on technology dissemination and spillovers 	<ul style="list-style-type: none"> • Specialized zones focused on GVC-intense industries (e.g. automotive, electronics) • Services zones (e.g. business process outsourcing, call centres)
Low-income economies	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulate industrial development and diversification • Offset weaknesses in investment climate • Implement or pilot business reforms in a limited area • Concentrate investment in infrastructure in a limited area • Focus on direct employment and export benefits 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-activity zones • Resource-based zones aimed at attracting processing industries

Gambar 2.4 Tahapan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: UNCTAD, 2019

Indonesia terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah: rempah-rempah, kayu, beras, tembaga, timah, emas, kopi, teh, kakao, tembakau, karet, dan sejak 1883—minyak mineral. Pada masa kemerdekaan, perekonomian sangat bergantung pada perdagangan komoditas. Pada tahun 1949, pemerintah memulai industrialisasi sebagai mesin pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi berevolusi dengan rezim politik dan krisis ekonomi dan secara luas dapat diklasifikasikan menjadi tiga fase berbeda: 1949-1966, 1967-1999, dan 2005-selanjutnya. Setiap fase dikaitkan dengan perubahan evolusioner di zona ekonomi (Aggarwal, Aradhna - ADB, 2022).

2.3. Metode Penyusunan Proyeksi dan Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Perekonomian Wilayah

Dokumen proyeksi permintaan tenaga kerja disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan analisis serta beberapa sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam kajian ini meliputi data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DENAS KEK), Kementerian Ketenagakerjaan, *International Labor Organization*, Dinas atau OPD terkait serta berbagai sumber lainnya.

Pendekatan awal yang dilakukan dalam penyusunan dokumen ini antara lain adalah studi kepustakaan (*desk study*), hal ini berfungsi sebagai materi awal yang menjadi pengantar untuk dapat menganalisis perkembangan ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di kawasan. Hal tersebut akan dilakukan secara mendalam terhadap berbagai dokumen, data sekunder, serta fenomena-fenomena yang terkait dengan perkembangan ketenagakerjaan di daerah dan di kawasan. *Desk study* juga merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran terlebih dahulu terhadap fenomena yang diamati. Selanjutnya untuk mendukung *desk study* dilakukan kunjungan atau studi lapangan dan FGD sebagai cakupan analisis.

Field Study (Studi Lapangan) dilakukan untuk menggali informasi terbaru beserta data-data kuantitatif yang mutakhir dan informasi-informasi yang sulit diperoleh melalui kajian literatur. Studi lapangan akan dilakukan di Kawasan yang menjadi tujuan dalam analisis. Subjek yang menjadi pengamatan studi lapangan di antaranya adalah

OPD atau Dinas terkait di daerah, pengelola kawasan serta representatif dari pelaku usaha.

Pada tahap selanjutnya, akan dilakukan pemaparan hasil desk study, studi lapangan dan hasil analisis kuantitatif dalam kegiatan FGD. FGD ini dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya dan mendapatkan berbagai masukan stakeholders terkait yang dinilai kompeten.

Analisis Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja

Proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK merupakan salah satu output yang akan disajikan dalam dokumen ini. Untuk memproyeksi tenaga kerja perlu didahului dengan melakukan proyeksi investasi di setiap KEK, karena investasi merupakan determinan penyerapan tenaga kerja. Data yang digunakan untuk melakukan proyeksi seluruhnya bersumber dari Dewan Nasional KEK, yaitu data target dan realisasi investasi serta penyerapan tenaga kerja. Proyeksi menggunakan 2 skenario, yakni moderat (low) dan optimis (high). Skenario didasarkan pada asumsi realisasi investasi selama 5 tahun ke depan.

Proyeksi tenaga kerja, terlebih dahulu diestimasi elastisitas pertumbuhan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan rasio antara penyerapan tenaga kerja terhadap nilai investasi. Setiap KEK memiliki rasio yang berbeda. Penentuan besaran asumsi (moderat & optimis) didasarkan pada capaian realisasi dan pertumbuhan investasi di masing-masing KEK. Karena capaian dan pertumbuhan investasi di setiap KEK berbeda maka penentuan besaran asumsi pada 5 tahun mendatang (2028) juga berbeda.

Analisis Dampak Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Terhadap Perekonomian Wilayah

Selanjutnya penyusunan dokumen juga dianalisis dengan metode kuantitatif seperti analisis trend dan analisis ekonomi keseimbangan umum (CGE). Analisis ini dilakukan untuk menentukan hasil proyeksi dan mengestimasi dampak pembangunan kawasan terhadap kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait langsung maupun tidak langsung. Model CGE merupakan salah satu bentuk model multi sektoral yang sudah secara luas digunakan saat ini. Meluasnya penggunaan model CGE didukung oleh perkembangan teknologi komputasi dan memungkinkan untuk menganalisis perbedaan dampak antar sektor produksi dan antar kelompok sosial ekonomi (Devarajan dan Robinson, 2002). Terkait dengan tujuan analisis pada dokumen ini, dilakukan beberapa justifikasi skenario dampak investasi pembangunan infrastruktur kawasan terhadap kesempatan kerja.

Model CGE yang digunakan adalah metode Ekonomi Keseimbangan Umum Regional atau *CGE IndoTERM* (The Enormous Regional Model). Model ini menggunakan data ekonomi Inter Region Input Output Indonesia untuk memperkirakan bagaimana sektor ekonomi bereaksi terhadap perubahan yang terjadi pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan, Pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor eksternal lain. Simulasi Pembangunan KEK akan dilihat dampaknya terhadap beberapa indikator pertumbuhan industri dan kesempatan kerja. Besaran simulasi yang digunakan adalah mempertimbangkan realisasi investasi di KEK dan pangsanya terhadap investasi di tingkat Propinsi.

BAB 3. PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN INVESTASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

3.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah sebesar 35.747,50 km². Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur cukup bervariasi. Sebanyak 43.08 persen diantaranya merupakan kawasan hutan. Jumlah lahan yang digunakan untuk lahan pertanian sebesar 9.28 persen. Jumlah tersebut terbagi untuk pemanfaatan perkebunan, sawah dan lahan pekarangan.

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang besar khususnya pada komoditas kelapa sawit sehingga menjadi lokasi yang paling potensial untuk mengembangkan industri produk turunan berbasis kelapa sawit di Kalimantan Timur. Hal tersebut dikarenakan Kutai Timur memiliki luas area perkebunan sawit dan jumlah produksi sawit terbesar dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, luas area perkebunan sawit di Kutai Timur di tahun 2021 mencapai 459,541 ha dengan total produksi di tahun 2021 sebesar 6,452,834 Ton.

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan Kabupaten Kutai Timur di tahun 2018 senilai 88,58 triliun rupiah. Di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar

8,59 triliun rupiah menjadi 97,17 triliun rupiah atau meningkat 9.7 persen. Terlihat bahwa struktur perekonomian di Kabupaten Kutai Timur sangat bergantung pada lapangan usaha pertambangan sebagai penggerak utama perekonomian di Kabupaten Kutai Timur dengan kontribusi mencapai 82.47 persen di tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan adanya perusahaan tambang batu bara besar di Kecamatan Sangatta Utara yaitu PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC).

Tabel 3.1 Nilai PDRB Menurut Sektor Usaha Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB 2018 (Juta Rp)	Distribusi (%)	PDRB 2022 (Juta Rp)	Distribusi (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,848,200.29	6.6	6,111,113.09	6.289
Pertambangan dan Penggalian	73,319,408.70	82.77	80,139,828.13	82.47
Industri Pengolahan	2,503,562.28	2.83	2,651,174.33	2.728
Pengadaan Listrik dan Gas	10,393.20	0.01	14,154.39	0.015
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,756.45	0.01	14,059.01	0.014
Konstruksi	1,535,196.95	1.73	2,023,974.73	2.083
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,653,845.63	1.87	1,940,331.66	1.997
Transportasi dan Pergudangan	893,915.61	1.01	1,034,535.91	1.065
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	213,587.28	0.24	242,135.16	0.249
Informasi dan Komunikasi	275,403.75	0.31	347,924.67	0.358
Jasa Keuangan dan Asuransi	146,562.80	0.17	169,010.98	0.174
Real Estate	320,673.22	0.36	356,877.9	0.367
Jasa Perusahaan	58,218.78	0.07	63,011.64	0.065
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	682,191.40	0.77	745,940.65	0.768
Jasa Pendidikan	842,175.05	0.95	977,107.88	1.006

Lapangan Usaha	PDRB 2018 (Juta Rp)	Distribusi (%)	PDRB 2022 (Juta Rp)	Distribusi (%)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126,269.62	0.14	184,375.64	0.19
Jasa Lainnya	141,128.85	0.16	158,867.19	0.163
PDRB Kab. Kutai Timur	88,582,489.86	100	97,174,422.96	100

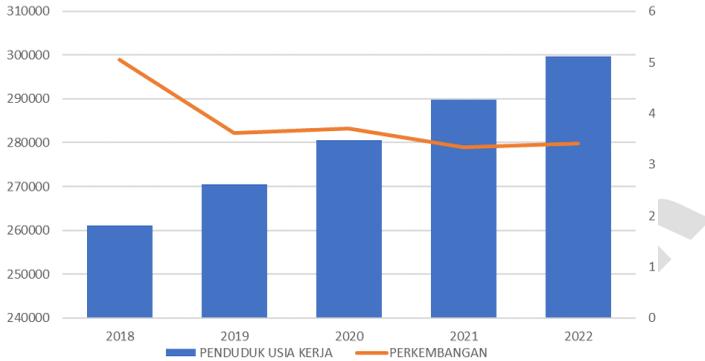
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar pada PDRB di kabupaten Kutai, setelah sektor pertambangan. Sektor tersebut berkontribusi hanya sebesar 6.29 persen dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2022. Kontribusi tertinggi sektor pertanian berada pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur perlu diikuti juga adanya pengembangan industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit.

3.2. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur

Informasi mengenai profil dan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan tenaga kerja dan menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh industri di Kabupaten Kutai Timur. Indikator pertama adalah Penduduk Usia Kerja (PUK). Secara definisi, PUK

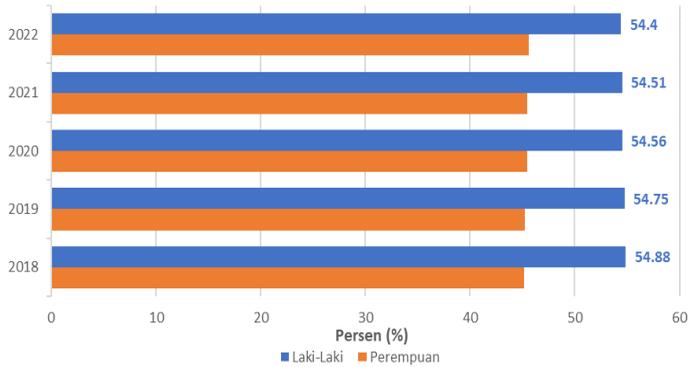
adalah penduduk yang berada pada usia produktif (15 tahun ke atas) meliputi baik itu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.



**Gambar 3.1 Perkembangan Penduduk Usia Kerja
Kabupaten Kutai Timur 2018-2022**

Sumber: SAKERNAS BPS

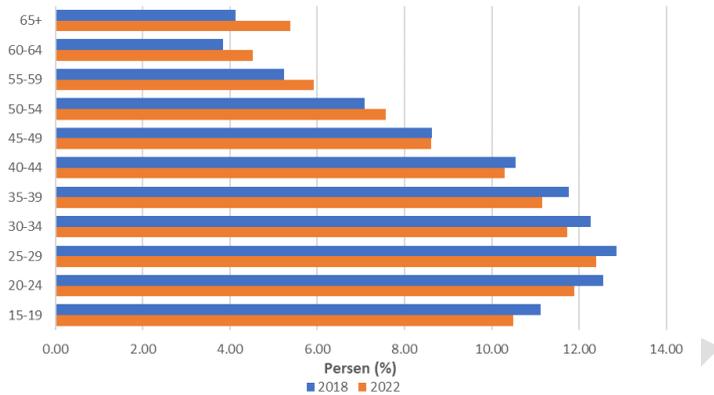
Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada periode 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 9.683 orang atau sebesar 3.63 persen. Pada bulan Agustus 2022, jumlah PUK di Kabupaten Kutai Timur mencapai 299.794 orang dengan komposisi 67,78 persen termasuk kedalam Angkatan Kerja, sedangkan 32,22 persen lainnya tergolong Bukan Angkatan Kerja.



**Gambar 3.2 Perkembangan Penduduk Usia Kerja
Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Kelamin 2018-
2022**

Sumber: SAKERNAS BPS

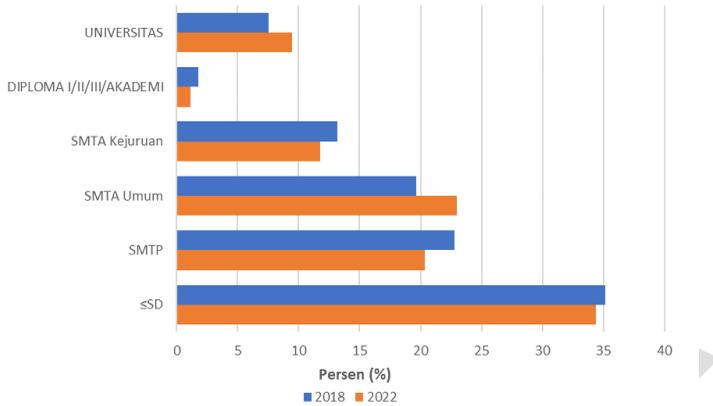
Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah PUK di Kabupaten Kutai Timur lebih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah PUK laki-laki 163 ribu orang di tahun tahun 2022, sedangkan jumlah PUK perempuan berada di angka 136 ribu orang dengan kontribusi 45.6 persen. Dalam lima tahun terakhir selisih antara PUK laki-laki dan perempuan berkisar ± 25 ribu orang. Secara persentase selisih antar keduanya semakin berkurang dari selisih sebesar 9.77 persen di tahun 2018 menjadi 8.8 persen di tahun 2022.



Gambar 3.3 Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Menurut golongan umur, PUK yang ada di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berada di usia 25-29 dengan jumlah mencapai 37 ribu orang atau sekitar 12,40 persen. Pada Gambar 3.4 terlihat bahwa di tahun 2022 terjadi penurunan persentase PUK di Kabupaten Kutai Timur pada usia 15-44 tahun dibandingkan tahun 2018. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa banyaknya PUK yang mulai menua ini tidak bisa diimbangi dengan tambahan PUK yang lebih muda.



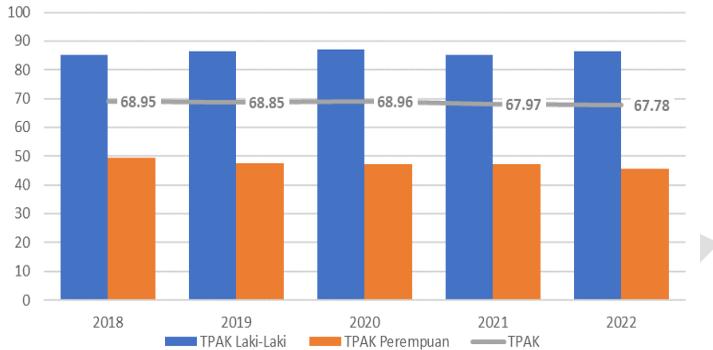
Gambar 3.4 Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Tingkat Pendidikan 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, struktur PUK di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan SD kebawah dengan jumlah 103 ribu orang atau mencapai 34.41 persen dari total PUK Kabupaten Kutai Timur tahun 2022. Secara persentase jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 35.13 persen. Walaupun trennya cenderung turun hal ini menjadi tugas berat bagi pemda untuk mendorong terus program wajib belajar mengingat lebih dari setengah PUK Kabupaten Kutai Timur masih berada di bawah jenjang pendidikan menengah.

Data PUK ini dapat diturunkan lagi untuk melihat indikator lain seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara definisi TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usai kerja lalu dikalikan dengan seratus. TPAK

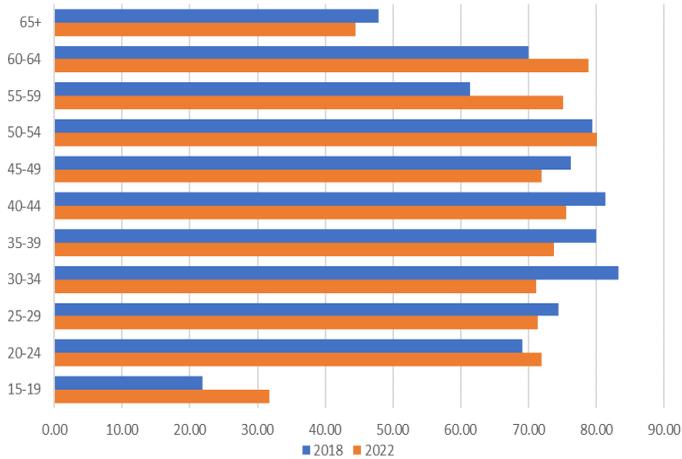
bermanfaat untuk mengindikasikan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja dalam suatu wilayah.



Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

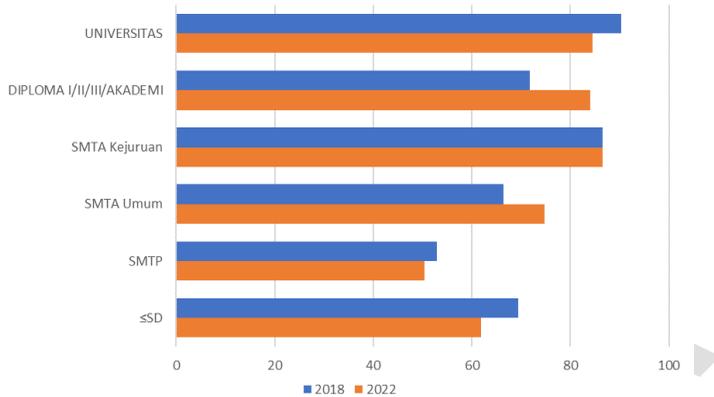
TPAK Kabupaten Kutai Timur pada periode 2018-2022 trennya mengalami penurunan dari 68.95 persen di tahun 2018 menjadi 67.78 persen di tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan penurunan tinggi pada TPAK perempuan. Dilihat dari angka TPAK berdasarkan jenis kelamin, angka TPAK laki-laki cenderung tinggi dan trennya meningkat berada di angka 86.32 persen di tahun 2022. Kondisi sebaliknya terjadi pada kondisi TPAK Perempuan di Kabupaten Kutai Timur yang trennya semakin menurun. Dimulai dari tahun 2018 yang sebelumnya sebesar 49.38 persen, lalu dua tahun berselang turun ke angka 47.12 persen hingga pada tahun 2022 hanya sebesar 45.65 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan lebih banyak perempuan di Kabupaten Kutai Timur yang memilih tidak aktif di pasar kerja.



Gambar 3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

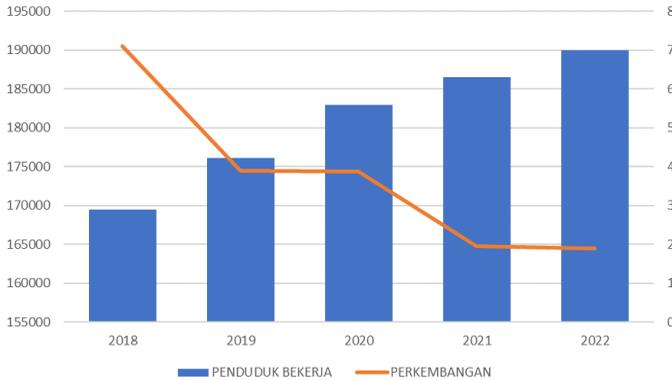
Dilihat dari kelompok usia, TPAK tertinggi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 berada pada rentang usia 50-54 tahun yang berada di angka 80.15 persen sedangkan TPAK di usia sekolah (15-19 tahun) menjadi yang terendah berada di angka 31.71 persen. Pada tahun 2022 terjadi penurunan TPAK yang besar pada rentang usia 30-34 tahun dibandingkan tahun 2018 menjadi sebesar 71.09 persen dari yang sebelumnya 83.30 persen.



Gambar 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Menurut Tingkat Pendidikan 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

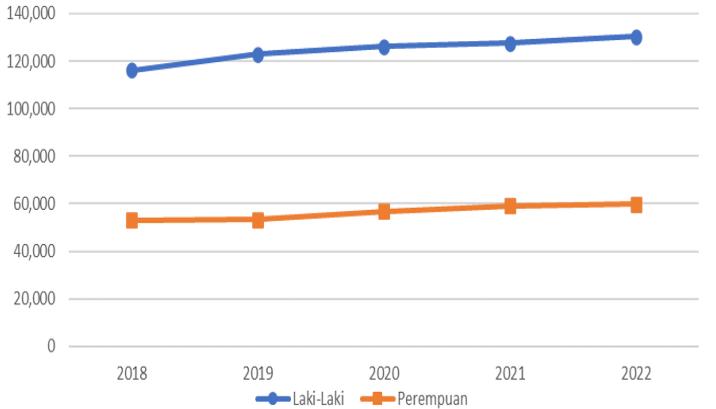
Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, TPAK tertinggi berada pada jenjang pendidikan universitas dengan TPAK sebesar 84.4 persen. Tingkat TPAK pada jenjang pendidikan rendah (SMTP kebawah) di Kutai Timur lebih rendah dibandingkan jenjang pendidikan lainnya dan juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi adanya upaya untuk peningkatan tingkat pendidikan masyarakat di Kutai Timur terlihat dari adanya penurunan persentase angkatan kerja yang berpendidikan SD kebawah terhadap total angkatan kerja di Kabupaten Kutai Timur setiap tahunnya pada periode 2018-2022.



Gambar 3.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja di Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

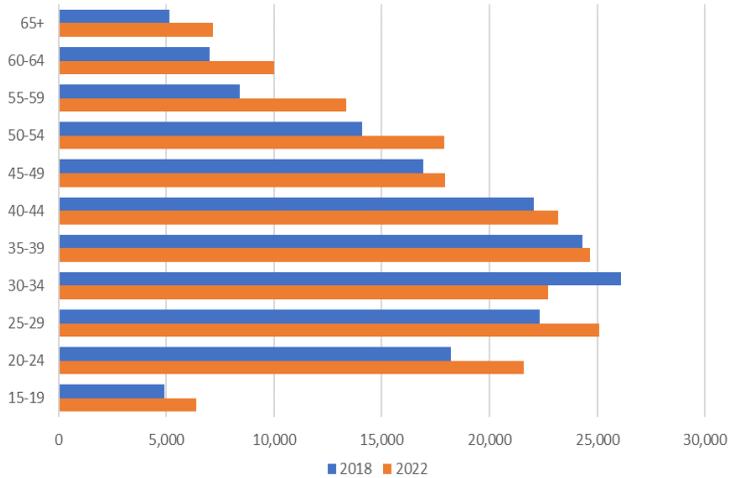
Indikator penduduk yang bekerja merupakan indikator yang menggambarkan capaian penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Gambar 3.9 perkembangan penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2018-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 190.005 orang di tahun 2022 dengan rata-rata peningkatan 5 ribu orang. Namun, besarnya pertumbuhan tersebut cenderung semakin kecil.



Gambar 3.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Kutai Timur Menurut Jenis Kelamin 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

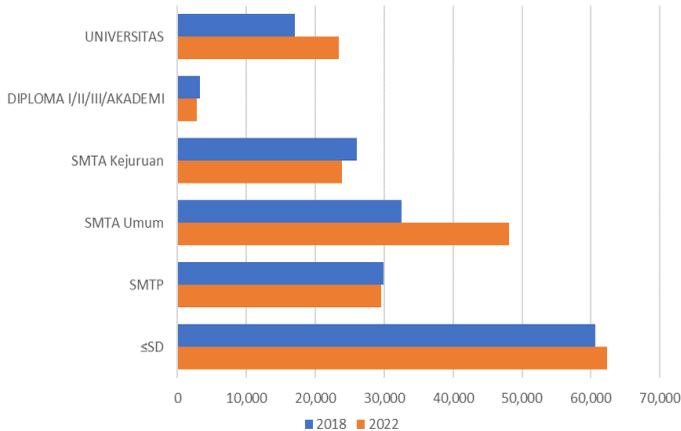
Dilihat dari jenis kelamin, terjadi tren peningkatan PYB baik laki-laki maupun perempuan pada periode 2018-2022. Rata-rata peningkatan PYB laki-laki sebesar 3.498 orang sedangkan peningkatan PYB perempuan sebesar 1.639 orang. Secara persentase PYB di Kutai Timur didominasi oleh laki-laki mencapai 68,53 persen di tahun 2022.



Gambar 3.10 Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Kutai Timur Menurut Golongan Umur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dilihat dari golongan umur, PYB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 paling banyak berada di rentang usia 25-29 tahun dengan jumlah 25 ribu orang atau berkontribusi terhadap 13,21 persen total PYB Kabupaten Kutai Timur. Peningkatan PYB terjadi di hampir semua rentang usia kecuali pada usia 30-34 tahun yang mengalami penurunan sekitar 3 ribu orang dibandingkan tahun 2018.

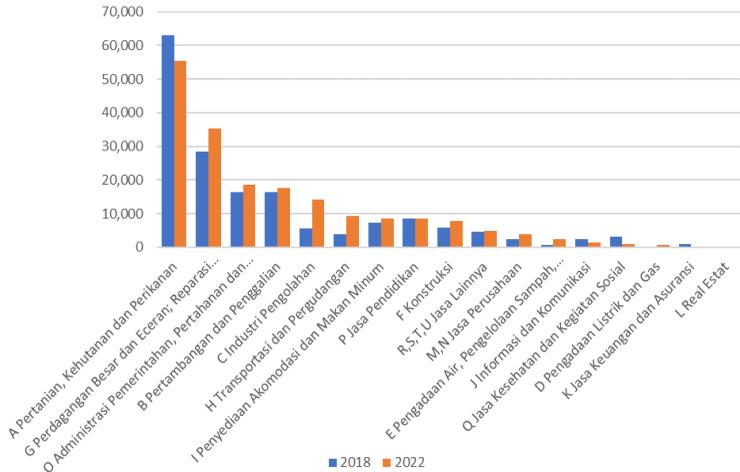


Gambar 3.11 Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dari sisi pengelompokan penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penduduk bekerja di Kabupaten Kutai Timur masih berada pada kelompok SD kebawah dengan persentase mencapai 32,8 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh pekerjaan yang tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi. Namun, peningkatan yang tinggi pada PYB jenjang pendidikan SMTA umum dan universitas menjadi sinyal mulai dibutuhkannya pekerja dengan kompetensi yang lebih tinggi.

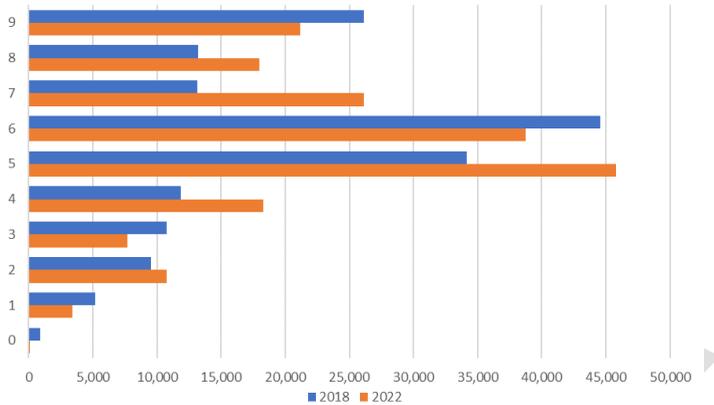
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Gambar 3.12 Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dilihat dari jenis lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh pekerja yang berada di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah sebanyak 55 ribu orang di tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak ± 7 ribu orang dibandingkan tahun 2018. Peningkatan yang tinggi terjadi pada lapangan industri pengolahan dengan peningkatan ± 8 ribu orang. Kondisi tersebut mengindikasikan berkembangnya sektor industri pengolahan di Kabupaten Kutai Timur.



0 TNI/Polri; 1 Manajer; 2 Profesional; 3 Teknisi dan Asisten Profesional; 4 Tenaga Tata Usaha; 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan; 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi; 8 Operator dan Perakit Mesin; 9 Pekerja Kasar

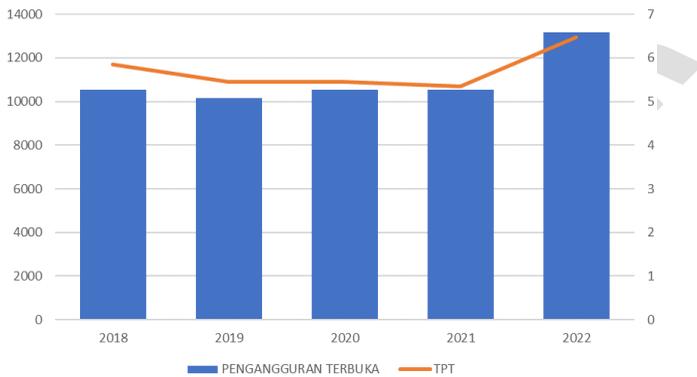
Gambar 3.13 Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Jabatan Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dilihat dari jenis jabatan yang diduduki oleh penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2022 didominasi oleh jabatan tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan dengan jumlah pekerja di tahun 2022 sebanyak 45 ribu orang atau berkontribusi 24,1 persen. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 11 ribu orang dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tertinggi terjadi pada pekerja pengolahan, Kerajinan, dan ybdi dengan peningkatan mencapai dua kali lipat dari sebelumnya 13 ribu orang di tahun 2018 menjadi 26 ribu orang di tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya PYB lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Kutai Timur.

Secara alamiah tidak semua angkatan kerja dapat seluruhnya bekerja atau tingkat pengangguran menjadi

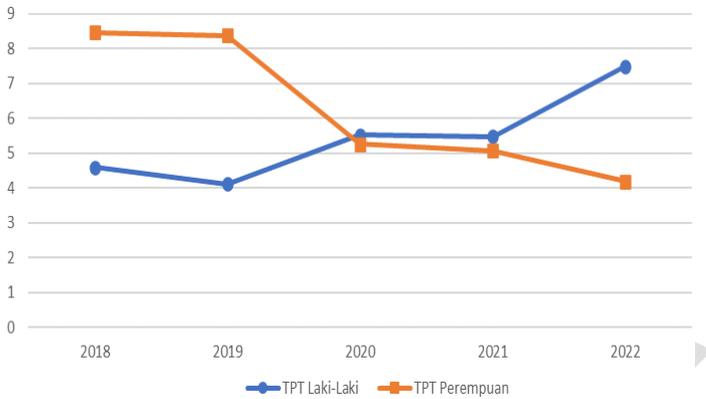
nol. Secara definisi, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari: 1) mencari pekerjaan, 2) mempersiapkan usaha, 3) tidak mencari pekerjaan karena alasan mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), 4) tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 3.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

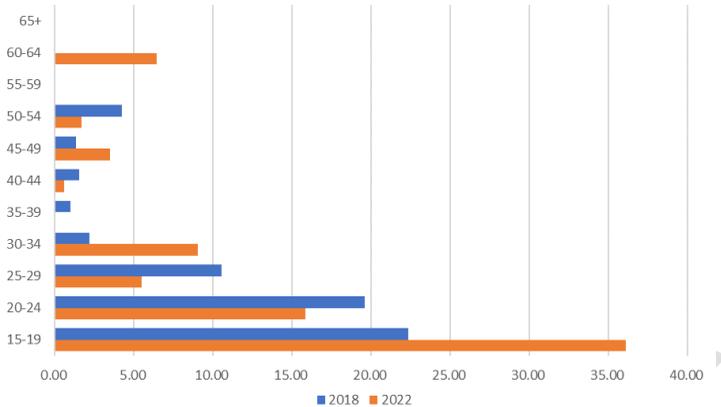
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Timur sempat menunjukkan tren penurunan dari 2018-2021 hingga berada di angka 5,35 persen. Namun, di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,13 persen menjadi 6,48 persen. Angka TPT dapat menjadi salah satu indikator yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 3.15 Perkembangan TPT Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan di Kabupaten Kutai Timur pada periode 2018-2022 cenderung memiliki tren yang menurun dari sebesar 8,47 persen tahun 2018 menjadi 4,19 persen di tahun 2022. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan kondisi TPT laki-laki yang trennya mengalami peningkatan dari 4,59 persen di tahun 2018 menjadi 7,50 persen. Penurunan tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja menjadi salah satu penyebab turunnya TPT perempuan di Kabupaten Kutai Timur. Kondisi sebaliknya terjadi pada laki-laki dan lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan peningkatan yang terjadi, sehingga membuat TPT laki-laki mengalami peningkatan.



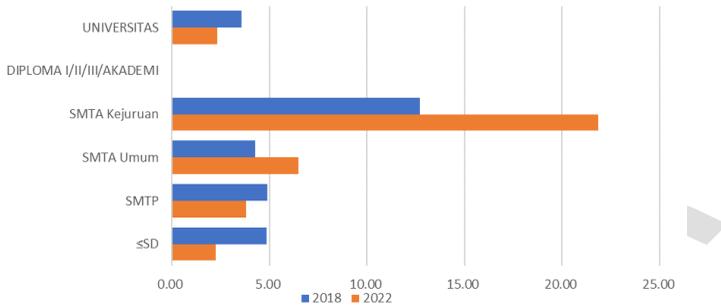
Gambar 3.16 Perkembangan TPT Menurut Golongan Umur Kabupaten Kutai Timur 2018-2022

Sumber: SAKERNAS BPS

Dilihat dari golongan umur, TPT tertinggi di Kabupaten Kutai Timur berada pada usia 15-19 tahun dengan TPT mencapai 36,11 persen di tahun 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 22,15 persen. Tingginya TPT di usia muda harus menjadi perhatian bagi Pemda Kutai Timur agar melakukan intervensi seperti pembakalan pra kerja ataupun pelatihan peningkatan kompetensi karena di rentang usia tersebut biasanya seseorang akan pertama kali memasuki dunia kerja.

Apabila dilihat dari sisi tingkat pendidikan, TPT tertinggi di Kabupaten Kutai Timur berada pada jenjang pendidikan SMTA Kejuruan sebesar 21,83 persen di tahun 2022. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka 12,72 persen. Tingginya pengangguran tingkat SMTA Kejuruan di Kutai Timur perlu ditelaah lebih lanjut mengenai ketersediaan jurusan yang ada di Kutai Timur dengan

industri yang berkembang di Kutai Timur agar terjadi *mismatch* dapat dihindari dan menurunkan tingkat pengangguran di jenjang SMTA Kejuruan.



Gambar 3.17 TPT Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022 Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber: SAKERNAS BPS

Ketersediaan tenaga kerja khususnya yang dapat mensupport KEK MBTK dapat terlihat dari profil lulusan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi seperti universitas atau politeknik serta pendidikan menengah formal seperti sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Selain melalui pendidikan formal juga dapat didukung oleh lulusan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal seperti lembaga pelatihan, lembaga kursus, dan lain-lain milik Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta.

Lulusan Lembaga Pendidikan Formal

Ketersediaan tenaga kerja yang berasal lulusan lembaga pendidikan formal tentunya sangat dipengaruhi dari jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data dari Kemendikbud RI, lembaga pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Kutai Timur terdiri atas 26 Sekolah Menengah

Atas (SMA), 9 Madrasah Aliyah (MA), 24 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Kutai Timur terdapat 3 sekolah tinggi yang salah satunya bergerak di bidang pertanian yaitu Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur yang memiliki 5 program studi diantaranya: Agroteknologi, Ilmu Kelautan, Kehutanan, Peternakan, Teknik Pertanian.

Data dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Timur terdapat 2.228 lulusan SMK di Kutai Timur pada tahun 2023. Secara jenis keahlian, terdapat 8 SMK yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki fokus pada sektor pertanian yaitu: SMKS Muhammadiyah Sangkulirang, SMKN 2 Bengalon, SMKN 1 Muara Wahau, SMKN 1 Telen, SMKN 1 Sangkulirang, SMKN 2 Sangkulirang, SMKN 1 Karang, SMKN 1 Muara Bengkal. Namun, belum diketahui apakah masih bersifat on-farm atau sudah fokus ke tahap pengolahannya mengingat pembangunan KEK MBTK memiliki lapangan usaha utama pada pengolahan produk turunan kelapa sawit.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Lulusan Peserta Didik SMK Menurut Jurusan di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama SMK	Jumlah Lulusan	Status Lulusan					
		Jurusan/Kompetensi	L	P	Bekerja	Melanjutkan	Wirausaha	Dalam Proses
1	SMKN 1 Sangatta Utara	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	7	61	8	6	1	0
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	11	59	8	7	2	0
		Bisnis Daring dan Pemasaran	13	16	6	5	1	0
		Tata Busana	0	32	7	6	4	0
		Teknik Komputer dan Jaringan	24	10	10	7	1	0
		Multimedia	25	11	9	7	2	0

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

2	SMKN 2 Sangatta Utara	Nautika Kapal Penangkap Ikan	272	56	118	59	20	131
		Teknik Kapal Niaga						
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif						
		Teknik Alat Berat						
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor						
		Geologi Pertambangan						
		Agribisnis Perikanan Air Tawar						
		Nautika Kapal Niaga						
3	SMKN 1 Rantau Pulung	Teknik Komputer dan Jaringan	24	20	11	8	4	21
4	SMKN 1 Bengalon	Teknik Komputer dan Jaringan	1	66	37	11	6	13
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	69	0	48	5	9	7
		Teknik Alat Berat	30	1	21	5	3	2
5	SMKN 2 Bengalon	Agribisnis Tanaman Perkebunan	25	18	22	6	2	6
6	SMKN 1 Muara Wahau	Agribisnis Tanaman Perkebunan	49	12	30	15	5	11
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	13	50	15	25	3	20
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	25	0	15	3	0	7
7	SMKN 1 Telen	Agribisnis Tanaman Perkebunan	14	7	5	2	0	14
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	9	16	3	3	0	19
8	SMKN 1 Kongbeng	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	65	3	26	6	3	18
		Teknik Komputer dan Jaringan	5	29	3	12	0	19
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	5	28	11	6	0	16
9	SMKN 1 Sangkulirang	Agribisnis Tanaman Perkebunan	22	15	24	5	0	4
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran						
10	SMKN 2 Sangkulirang	Agribisnis Tanaman Perkebunan	22	9	16	3	0	13
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	13	6	1	1	6
11	SMKN 1 Kaliorang	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	80	0	60	5	4	11
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	28	12	3	8	7
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	24	8	4	1	13

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

12	SMKN 1 Karangan	Agribisnis Tanaman Perkebunan	34	26	47	8	0	5
13	SMKN 1 Muara Bengkal	Agribisnis Tanaman Perkebunan	12	2	6	2	0	6
		Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	28	14	6	6	0	30
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	16	0	8	2	1	5
14	SMKS Islam Nurul Hikmah Sangatta Utara	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	13	15	10	3	4	9
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga	9	14	9	2	3	11
15	SMKS Muhammadiyah 1 Sangatta Utara	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	90	1	43	7	0	41
		Teknik Alat Berat	30	0	20	5	1	4
		Teknik Instalasi Tenaga Listrik	27	0	16	2	0	9
		Teknik Komputer dan Jaringan	11	15	7	5	0	14
		Rekayasa Perangkat Lunak	19	4	4	6	0	13
16	SMKS Persada Sangatta Utara	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	46	0	11	0	1	34
		Teknik Komputer dan Jaringan	4	31	16	9	0	10
17	SMKS Hasanuddin Sangatta Selatan	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	0	0	0	0	0	0
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	21	0	10	0	4	7
18	SMKS Perawat Singa Geweh Sangatta Selatan	Asisten Keperawatan	3	35	10	21	4	3
19	SMKS Kutim Cemerlang Teluk Pandan	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	46	0	11	0	1	34
		Teknik Komputer dan Jaringan	4	31	16	9	0	10
20	SMKS Al Kautsar Bangalon	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	15	0	15	0	0	0
21	SMKS Hidayatul Mubtadi'in Kongbeng	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	79	41	45	20	30	25
22	SMKS Al-Qur'an dan Dakwah Alam Kongbeng	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	0	0	1	0	1
23	SMKS Tridaya Harapan Sangkulirang	-	0	0	0	0	0	0
24		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	21	0	15	0	3	3

SMKS Muhammadiyah Sangkulirang	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	7	24	20	5	3	6
	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	12	12	15	5	2	2
	Agribisnis Tanaman Perkebunan	9	5	8	1	2	3
JUMLAH TOTAL		1.374	854	907	344	139	643

Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Lulusan Lembaga Pelatihan

Tidak hanya dari Lembaga pendidikan formal ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas juga dapat berasal dari lembaga non formal melalui pelatihan-pelatihan vokasional yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Namun, Karena sejauh ini belum terlihat potensi lowongan dan keahlian yang dibutuhkannya yang ada di KEK MBTK pelatihan yang dilakukan masih bersifat global belum berfokus pada pelatihan yang berkaitan dengan pengolahan kelapa sawit.

Pelatihan yang dilakukan sejauh ini masih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tambang seperti mekanik dan operator. Untuk bekerja di sektor perkebunan ini minat dari masyarakat Kutai Timur sendiri masih rendah dan lebih berorientasi bekerja ke tambang karena pekerja sawit lebih membutuhkan fisik yang kuat. Tetapi saat ini sudah mulai disiapkan beberapa pelatihan dan sarana prasarana sudah mulai ditingkatkan. Tabel 3.3 menunjukkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur serta Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.3 Pelatihan yang Dilakukan OPD Kabupaten Kutai Timur

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Pelaksana Latihan Kerja	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	BLKI Mandiri	mekanik alat berat	
		Welder	
	LPK Swasta	operator escavator alat berat	
		Menjahit	
	LPK Perusahaan	security	
		las (SMAW 3.G)	
		pemeliharaan kendaraan ringan system konvensional dan injeksi	
		TIK (desain grafis)	
		listrik instalasi bangunan	
		Teknisi AC	
		tata boga	
		tata rias	
		bisnis manajemen	
industri kreatif			
2	Bidang Perluasan dan Penempatan Kerja	Hidroponik	100
		Pembuatan Sirup Jahe	50
		Pembuatan Keripik Pisang	50

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Timur

DINAS KOPERASI UMKM KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sumber Anggaran	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
2022			
1	APBD	Pelatihan Kewirausahaan Koperasi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	28 Orang
2	APBD	Pelatihan Manajemen Koperasi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi	30 Orang
3	APBD	Sosialisasi Digitalisasi Koperasi	20 Orang
2023			
4	APBD	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Bagian 1	30 Orang
5	APBD	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Bagian 2	30 Orang
6	APBD	Sosialisasi Digitalisasi Koperasi KSP/USP	30 Orang
7	APBD	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus / Pengelola Dalam Manajemen dan Penatausahaan Koperasi	20 Orang
8	APBD	Pelatihan Kapasitas Memanfaatkan dan Meningkatkan Produk Unggulan Masyarakat	30 Orang
9	APBD	Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Bagi Koperasi	20 Orang
10	APBD	Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Komputer/Digital	20 Orang
11	APBD	Pelatihan Menuju Koperasi Modern dan Berdaya Saing	20 Orang

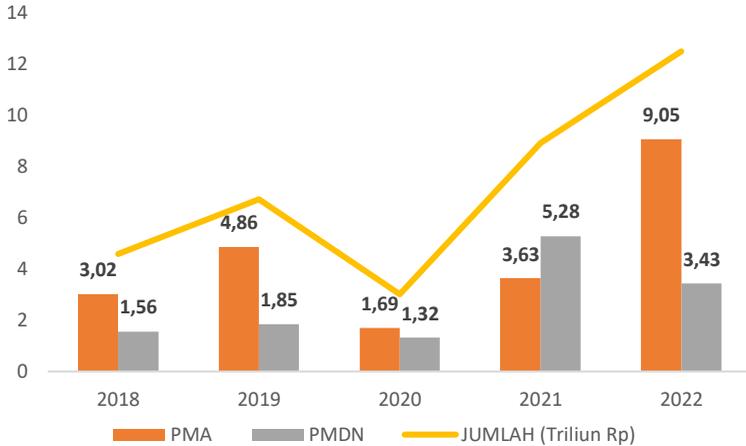
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur

Pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh Distransnaker Kutai Timur dilakukan dengan bekerjasama dengan BLK mandiri dan LPK swasta maupun LPK perusahaan. Terdapat pula pelatihan yang berbasis

kewirausahaan yang dilakukan bidang perluasan dan penempatan kerja seperti hidroponik dan pembuatan produk olahan dari hasil-hasil pertanian. Tidak hanya distransfer tetapi terdapat juga pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM yang berfokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM dengan pemberian pelatihan tentang manajemen dan digitalisasi.

3.2 Kinerja Investasi di Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan data perkembangan realisasi investasi yang diperoleh dari Laporan Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur, perkembangan realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur trennya semakin meningkat dari 2018 hingga 2022. Di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan jumlah realisasi investasi di Kutai Timur menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,70 triliun menjadi Rp3,01 triliun. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peningkatan menjadi Rp8,91 Triliun di tahun 2021 bahkan pada tahun 2022 jumlahnya telah mencapai Rp12,48 Triliun.

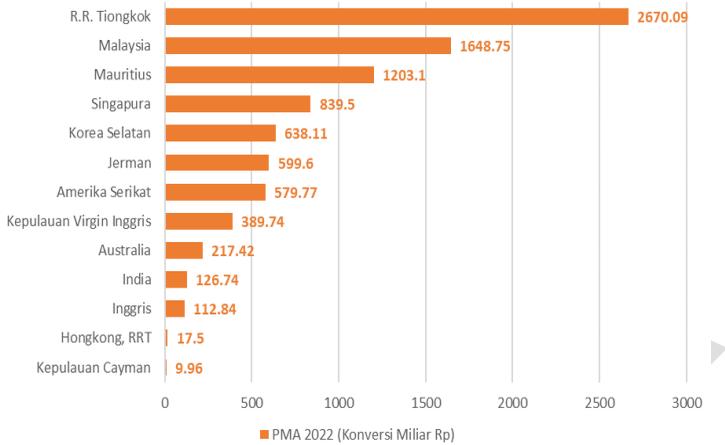


Gambar 3.18 Realisasi Investasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Kutai Timur

Dilihat dari sumber investasi, realisasi investasi di Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2022, jumlah PMA yang masuk ke Kabupaten Kutai Timur mencapai 9,05 triliun rupiah sedangkan jumlah PMDN di tahun tersebut hanya sebesar 3,43 triliun rupiah. Jika dilihat dari negara yang melakukan investasi, sumber terbesar PMA yang masuk ke Kabupaten Kutai Timur di tahun 2022 dipimpin oleh China dengan realisasi mencapai 2,67 triliun rupiah. Posisi kedua ditempati oleh Malaysia dengan realisasi 1,65 triliun rupiah dan selanjutnya oleh Mauritius dengan realisasi 1,20 triliun rupiah.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Gambar 3.19 Realisasi PMA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Menurut Asal Negara (Miliar Rp)

Sumber: BKPM

Sektor yang menjadi tujuan terbesar investasi asing di Kabupaten Kutai Timur di tahun 2022 didominasi oleh investasi yang berasal dari sektor pertambangan dengan realisasi mencapai 3,48 triliun rupiah, diikuti oleh sektor yang masih berkaitan dengan pertambangan yaitu industri mineral dan non logam dengan realisasi 3,06 triliun. Kedua sektor tersebut berkontribusi terhadap 72,27 persen total PMA di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.4 Realisasi PMA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Menurut Sektor (Miliar Rp)

Sektor	Realisasi Investasi (Miliar Rp)	Tenaga Kerja	
		TKI	TKA
Pertambangan	3,480.25	1075	28
Industri mineral non logam	3,059.83	739	243
Industri Kimia & farmasi	837.69	6	0
Tanaman pangan & perkebunan	733.00	1101	7

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Sektor	Realisasi Investasi (Miliar Rp)	Tenaga Kerja	
		TKI	TKA
Industri makan	488.32	24	12
Kehutanan	431.08	51	0
Perumahan, kawasan industri & perkantoran	22.98	35	0
Perdagangan & reparasi	0.63	1	0

Sumber: DPMPTSP Kutai Timur

Berdasarkan data dari DPMPTSP Kutai Timur, total investasi asing tersebut mampu menyerap 3.032 Tenaga Kerja Indonesia dan 290 Tenaga Kerja Asing. Sektor industri mineral non logam menjadi sektor yang menyerap TKA paling banyak, sedangkan TKI paling banyak terserap di sektor Tanaman pangan & perkebunan.

**Tabel 3.5 Realisasi PMDN Kabupaten Kutai Timur Tahun
2022 Menurut Sektor (Miliar Rp)**

Sektor	Realisasi Investasi (Miliar Rp)	Tenaga Kerja	
		TKI	TKA
Pertambangan	1,509.93	4285	6
Industri makanan	998.72	2695	1
Tanaman pangan & perkebunan	595.00	5645	0
Kehutanan	140.00	232	0
Transportasi, gudang & komunikasi	47.14	1	0
Industri Kimia & farmasi	37.58	4	0
Perumahan, kawasan industri & perkantoran	36.71	0	0
Jasa lainnya	28.14	264	0
Listrik, gas dan air	18.59	0	0
Industri mineral non logam	8.67	10	0
Perdagangan & reparasi	2.81	62	0

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Sektor	Realisasi Investasi (Miliar Rp)	Tenaga Kerja	
		TKI	TKA
Hotel & Restoran	2.24	19	0
Konstruksi	2.19	157	0
Industri karet & plastik	0.71	0	0
Industri Kertas & percetakan	0.50	5	0

Sumber: DPMPTSP Kutai Timur

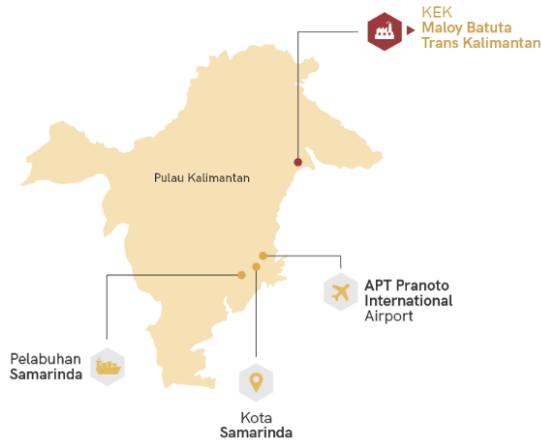
Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat dari sektor yang menjadi tujuan utama investor domestik di Kabupaten Kutai Timur yang masih berada pada sektor pertambangan dengan realisasi investasi mencapai 1,51 triliun rupiah. Sektor ini berkontribusi terhadap 44 persen total PMDN di Kutai Timur tahun 2022. Sektor selanjutnya ditempati oleh realisasi investasi dari industri makanan dengan realisasi 998 miliar rupiah. Total investasi dalam negeri ini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan investasi asing yang masuk ke Kutai Timur. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang terserap sebanyak 13.379 orang sedangkan Tenaga Kerja Asing yang terserap sebanyak 7 orang.

BAB 4. GAMBARAN UMUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS MBTK

5.1. Gambaran Umum KEK MBTK

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus MBTK didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 dengan proyeksi dapat menarik investasi sebesar Rp.34,4T dan menyerap tenaga kerja sebanyak 55.700 tenaga kerja hingga tahun 2025 serta mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. KEK ini dikelola oleh PT Maloy Batuta Trans Kalimantan selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (BUPP KEK).

Pengusulan KEK MBTK ini ditempuh melalui swasta dengan pembentukan perusahaan konsorsium yaitu PT MBTK yang terdiri dari tiga pemegang saham yang terdiri dari pemerintah daerah melalui perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS), dan bakrie group melalui PT Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) dan Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ). Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. KEK MBTK resmi beroperasi terhitung sejak 1 April Tahun 2019. Pengembangan KEK MBTK dapat menjadi tiang pertumbuhan ekonomi baru dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terpusat di Pulau Jawa.



Gambar 4.1 Lokasi KEK MBTK

Sumber: Dewan Nasional KEK

KEK MBTK memiliki luas kawasan mencapai 557,34 hektar. Mengingat kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai kegiatan industri dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti kebutuhan utilitas, untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif, maka diperlukan penerapan sistem zoning dalam perencanaan bloknya. Luas areal zona industri tersebut terbagi ke dalam beberapa zona peruntukan, yaitu:

Zona 1 : Basic Oleochemical

Terdiri dari: Biodiesel dan Basic chemicals (Fatty acids, Fatty alcohols, Purified glyserin).

Zona 2 : Basic Oleochemical

Terdiri dari: Minyak goreng, Margarin dan Shortening, Minyak sawit merah, Palmega, Shortening

Goreng Kelapa Sawit, Palm Ghee / Vanaspati,
Beta karoten.

Zona 3 : Industri Non Makanan

Terdiri dari: Industri Produk Perawatan (Industri Surfaktan, Deterjen, Industri Sabun, Kosmetika) dan Industri Berbasis Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit (Industri Briket Arang, Industri Makanan Ternak, Industri Kompos, Industri Karbon Aktif, Industri Particle Board)

Zona 4 : Industri Lainnya Mesin

Terdiri dari: Mesin, Kemasan / Bioplastik

Zona 5 : Fasilitas Pendukung

Beberapa sarana dan prasarana yang sudah tersedia di dalam KEK MBTK, diantaranya: Jalan dalam kawasan sepanjang 11,44 KM, realisasi konstruksi rigid 3,25 KM dan 8,19 KM masih hamparan tanah, pasokan listrik sebesar 30 MW oleh PLN dan Menara telekomunikasi, terbangun WTP dengan kapasitas 200 liter/detik, Pelabuhan Multipurpose Maloy, Kantor Administrator dan Pengola, Pos Keamanan, dan Pemadam Kebakaran.



Gambar 4.2 Masterplan KEK MBTK

Sumber: BUPP KEK MBTK

KEK MBTK dirancang sebagai kawasan industri hilir dari CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pembangunan KEK ini juga menjadi upaya untuk mengubah sektor perekonomian daerah dari yang saat ini masih bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) khususnya batubara menuju pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) dengan mengembangkan potensi industri perkebunan dan pertanian, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Selain berorientasi industri berbasis CPO dan produk samping Pabrik kelapa Sawit, KEK MBTK diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri potensial lainnya di Kutai Timur seperti pengolahan pisang.

5.2. Investasi di KEK MBTK

Berdasarkan data dari laporan BUPP KEK MBTK, tercatat jumlah realisasi yang ada di KEK MBTK pada

triwulan III tahun 2023 sebesar Rp92,8 Miliar. Jumlah tersebut disumbang oleh PT. Palma Serasih International. Tenant tersebut melakukan pembangunan di KEK MBTK dalam dua tahap. Pembangunan Tahap 1 berupa Pembangunan 6 tangki timbun (bulking station) kapasitas 5.000 MT dengan Rencana nilai investasi sebesar \pm Rp102 Miliar. Pembangunan Tahap 2 berupa pembangunan Refinery Minyak Goreng/Biodiesel. Terkait capaian KEK MBTK saat ini investasi di tahun 2023 sudah menyentuh 81,11 miliar dari target 94 miliar.

Terdapat perusahaan yang telah tahap perjanjian kerja sama investasi juli 2022, yaitu PT Energi Agro Investama. Perusahaan tersebut akan membangun Refinery Minyak Goreng dan Bio Diesel dengan rencana nilai investasi sebesar \pm 801 Miliar. Terdapat Perusahaan-perusahaan lainnya yang masih dalam tahap peninjauan: PT Samudera Pelabuhan Indonesia (Pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Maloy), Songgoritty Group (Industri pengolahan kayu terintegrasi), PT Perkebunan Nusantara III melalui PT Industri Nabati Lestari (Refinery Minyak Goreng), PT Dharma Satya Nusantara (Pembangunan pengolahan dan penimbunan cangkang sawit, Silo Pelet kayu pohon kelapa sawit, Refinery produk turunan CPO).

KEK MBTK ini memiliki nilai strategis untuk menunjang kebutuhan IKN. Yang menjadi kendala berkembangnya KEK yaitu dari status Perusahaan dan rencana peralihan status dari Perusahaan swasta menjadi BUMD. Kendala lainnya karena jaraknya jauh dari ibu kota provinsi dan akses jalannya susah. Banyak Perusahaan sawit di Kutim yang masih membangun hilirisasinya di

Pulau Jawa, harapannya bisa membangun refinery di KEK Maloy. Saat ini masih berusaha ikut mempromosikan KEK MBTK, tahun ini akan mengundang beberapa perusahaan sawit di Kutim untuk mensosialisasikan keuntungan-keuntungan berinvestasi di KEK MBTK agar bisa menarik minat masuk.

5.3. Tenaga Kerja KEK MBTK

Berdasarkan data dari laporan BUPP KEK MBTK, tercatat jumlah tenaga kerja yang terserap dalam serapan tenaga kerja untuk pembangunan tangki timbun PT. PSI berjumlah 169 orang yang terdiri dari tingkat manajerial sebanyak 3 orang, tingkat staff sebanyak 7 orang, dan jumlah pekerja kasar sebanyak 159 orang. Untuk tenaga kerja yang sudah terserap di tahun 2023 mencapai 122 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 80 orang. PT Energi Agro Investama direncanakan akan mempercepat rencana investasinya menjadi tahun ini. Forecasting yang dilakukan oleh PT EAI bisa menyerap 200-350 tenaga kerja saat beroperasi 2025. Pelaku usaha ini menginginkan tenaga kerja yang professional dan memiliki kapabilitas sehingga dari pemda juga harus bisa menyiapkan tenaga kerja yang bisa mensupport.

Dalam beberapa tahun kedepan KEK MBTK masih akan terus melakukan pembangunan seiring bertambahnya tenant yang akan masuk sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang kontruksi. Selain itu, dilihat dari perusahaan-perusahaan yang akan masuk hampir seluruhnya bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Pembangunan KEK MBTK sejatinya diniatkan untuk industri hilirisasi bukan menghadirkan lapangan sektor pertanian tetapi

menghasilkan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, walaupun secara tidak langsung memberikan multiplier effect ke pekerja sektor pertanian.

Terkait isu tenaga kerja BUPP terus mendorong penggunaan tenaga kerja lokal. Namun perlu ada sosialisasi atau wadah dari pemerintah jika ada perusahaan yang membutuhkan tenagakerja bisa mencari ketersediannya kualifikasinya di wadah tersebut. Terkait tenaga kerja mungkin dapat dilakukan pembuatan perda yang dapat mengatur para pelaku usaha memanfaatkan tenaga kerja lokal. Selain pemberian pelatihan, pemerintah juga perlu memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja.

PUSRENAKAWA

BAB 5. DAMPAK PEMBANGUNAN KEK MBTK DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di kawasan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi bagi peningkatan daya saing kawasan industri tersebut (Zakir, 2003). Sebab tingginya daya saing dan daya tarik kawasan industri salah satunya ditopang oleh aspek ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pembangunan KEK MBTK perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di kawasan baik selama pembangunan maupun setelah beroperasi.

5.1. Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perkonomian dan Perluasan Kesempatan Kerja

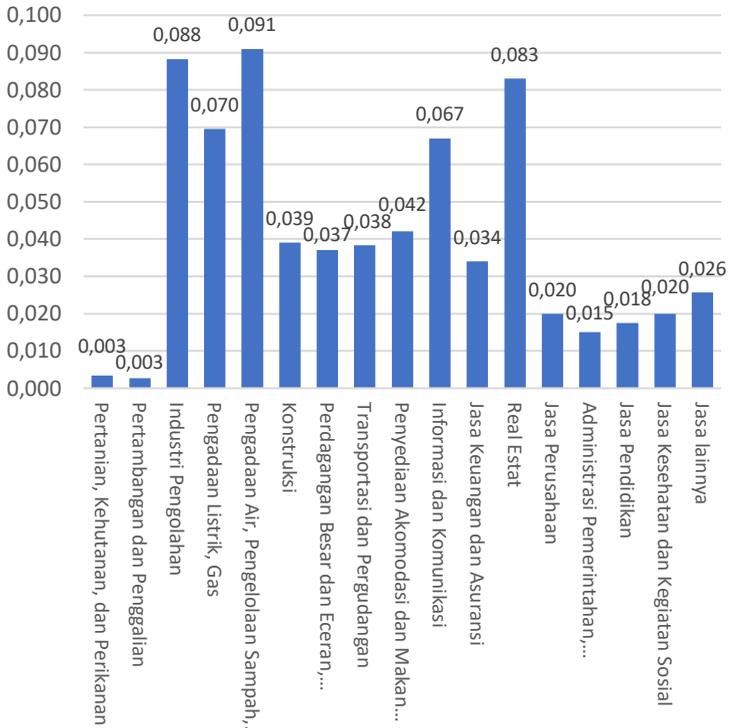
Pembangunan KEK MBTK diprediksi akan memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor di luar kegiatan utama di kawasan tersebut. Analisis dampak pembangunan KEK MBTK disusun dengan metode *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan pendekatan regional. Model ekonomi ini diarahkan untuk melihat dampak perubahan variabel ekonomi secara umum terhadap perekonomian wilayah seperti pertumbuhan sektoral dan distribusi penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor dan pendapatan pada berbagai bentuk rumah tangga, sektor industri dan beberapa indikator ekonomi makro. Besaran shock (simulasi) dilakukan

terhadap perkembangan peningkatan investasi pada KEK MBTK dikaitkan terhadap investasi pada propinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil kalkulasi maka besaran simulasi investasi pada KEK MBTK adalah sebesar 0,095 persen. Kecilnya simulasi (*shock*) yang diberikan dikarenakan realisasi investasi di KEK MBTK ini masih tergolong kecil.

Pembahasan mengenai dampak pembangunan KEK dalam dokumen ini akan difokuskan terhadap pertumbuhan output ekonomi sektoral dan perubahan kesempatan kerja (penyerapan tenaga kerja). Berdasarkan hasil analisis CGE, ketika terjadi pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi), maka akan memberikan dampak terhadap tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor yang terkait dengan kegiatan utama di KEK, namun juga pada sektor lainnya.

Sektor ekonomi yang akan terdampak tumbuh paling tinggi adalah sektor pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yang diperkirakan tumbuh 0,091 persen. Selanjutnya peningkatan akan terjadi pada sektor industri pengolahan yang akan tumbuh 0,088 persen, sektor real estat yang tumbuh 0,083 persen, dan sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 0,07 persen. Selain itu sektor-sektor yang lain pada umumnya juga mengalami peningkatan output. Dampak pembangunan KEK MBTK terhadap Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 5.1.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

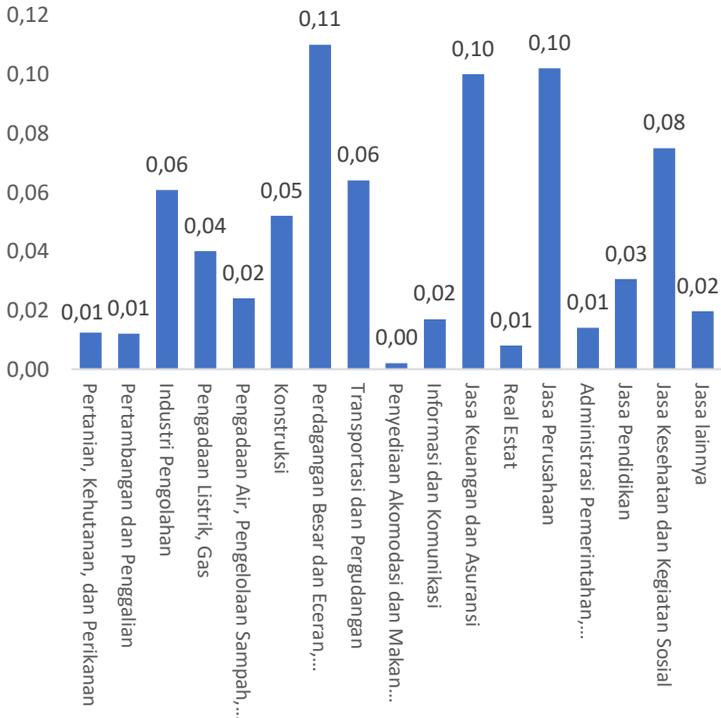


Gambar 5.1 Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perubahan Output Sektoral

Sumber: Hasil Kalkulasi Model CGE IndoTERM (2023)

Lebih lanjut, pembangunan KEK MBTK juga akan berdampak terhadap kesempatan kerja berdasarkan sektor. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan output maka serapan tenaga kerja juga sejalan dengan peningkatan tersebut.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Gambar 5.2 Dampak Pembangunan KEK MBTK Terhadap Perubahan Kesempatan Kerja Sektoral

Sumber: Hasil Kalkulasi Model CGE IndoTERM (2023)

Karena masih minimnya investasi pada KEK MBTK, berdampak pada peluang kesempatan kerja yang dihasilkan tidak terlalu besar. Sektor dengan peningkatan kesempatan kerja terbesar adalah perdagangan besar dan eceran dengan peningkatan sebesar 0,11 persen. Kemudian disusul kesempatan kerja pada sektor jasa perusahaan dan sektor jasa keuangan serta asuransi dengan perkiraan terjadi peningkatan sebesar 0,10. Sektor utama yang berada di KEK MBTK yaitu industri pengolahan

menempati posisi kelima dengan peningkatan sebesar 0,06 persen. Hal tersebut diakibatkan masih belum optimalnya KEK MBTK karena hanya ada 1 perusahaan yang telah melakukan pembangunan di dalam KEK MBTK.

5.2. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di KEK MBTK

Dalam melakukan memproyeksi tenaga kerja perlu didahului dengan melakukan proyeksi investasi di setiap KEK. Hal itu disebabkan karena investasi merupakan salah satu determinan penyerapan tenaga kerja. Proyeksi investasi menggunakan 2 scenario, yakni moderat (low) dan optimis (high). Skenario didasari pada asumsi realisasi investasi selama 5 tahun ke depan. Penentuan besaran asumsi (moderat & optimis) didasari pada capaian realisasi dan pertumbuhan investasi di masing-masing KEK. Karena capaian dan pertumbuhan investasi di setiap KEK berbeda maka penentuan besaran asumsi pada 5 tahun mendatang (2028) juga berbeda.

Untuk memproyeksi tenaga kerja, terlebih dahulu diestimasi elastisitas pertumbuhan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan rasio antara penyerapan tenaga kerja terhadap nilai investasi. Setiap KEK memiliki rasio yang berbeda. Nilai investasi per tenaga kerja untuk KEK MBTK rata-rata adalah sebesar Rp490 juta. Artinya dengan rata-rata investasi sebesar Rp490 juta maka akan menyerap 1 orang tenaga kerja. Rasio ini selanjutnya akan digunakan sebagai basis rasio untuk melakukan proyeksi tenaga kerja.

Tabel 5.1 Skenario Proyeksi Investasi Pada KEK MBTK

KAWASAN EKONOMI KHUSUS	Realisasi Investasi (Tw 3 2023)	Asumsi Realisasi Investasi (2028)	
		<i>Moderat (low)</i>	<i>Optimis (high)</i>
KEK MBTK	0.27%	20%	35%

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

Berdasarkan capaian kinerja investasi di KEK MBTK dan asumsi skenario realisasi investasi pada Tabel 5.1, maka diperoleh hasil proyeksi investasi di KEK MBTK seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.3. berdasarkan hasil proyeksi, pada asumsi moderat (low scenario) pada 2024 nilai investasi di KEK MBTK diperkirakan akan mencapai Rp688 miliar. Nilai tersebut meningkat dari realisasi triwulan III 2023 yang mencapai Rp92,8 miliar. Kemudian nilai investasi ini akan terus meningkat hingga pada 2028 mencapai Rp6,88 triliun. Lebih lanjut, jika menggunakan asumsi optimis (high scenario) maka pada 2024 diperkirakan nilai investasi KEK MBTK akan mencapai Rp860 miliar. Kemudian pada 2028 akan menyentuh Rp12,04 miliar. Proyeksi tersebut hanya akan bisa tercapai jika pihak pengelola KEK MBTK terus melakukan upaya meningkatkan daya tarik KEK MBTK di mata para investor. Proyeksi nilai investasi ini selanjutnya dijadikan basis untuk proyeksi permintaan tenaga kerja dengan menggunakan rasio nilai investasi per tenaga kerja di KEK MBTK.



Gambar 5.3 Proyeksi Investasi di KEK MBTK

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja 2024 hingga 2028, permintaan tenaga kerja di KEK MBTK diprediksi akan terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya tenant yang masuk. Secara lengkap, hasil proyeksi permintaan tenaga kerja ditunjukkan pada Gambar 5.4. Pada 2024 diperkirakan permintaan tenaga kerja di KEK MBTK akan mencapai sebanyak 1.419 orang pada skenario rendah dan sebesar 1.773 pada skenario tinggi. Jika dilihat secara jangka menengah, angka permintaan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan hasil proyeksi investasi yang terus meningkat. Pada 2028 diperkirakan permintaan tenaga kerja akan menjadi sebanyak 14.187 orang pada skenario rendah dan sebanyak 24.827 orang pada skenario tinggi. Capaian Proyeksi tersebut juga masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam masterplan KEK MBTK yang ditargetkan dapat menyerap 55.700 tenaga kerja di tahun 2025. Hal ini

menjadikan tugas besar bagi pihak pengelola kawasan untuk melakukan percepatan di KEK MBTK.

Dari hasil proyeksi permintaan tenaga kerja agregat KEK MBTK tersebut, maka selanjutnya akan diproyeksi sebaran (struktur) permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dan jabatan. Kedua indikator ini mengacu pada klasifikasi tabel Sakernas.



Gambar 5.4 Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK MBTK

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

Hasil proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di KEK MBTK, terlihat bahwa peningkatan permintaan tenaga kerja diperkirakan akan banyak terjadi pada lulusan dari pendidikan tinggi dan menengah. Berdasarkan proyeksi dengan asumsi moderat (skenario rendah), pada tahun 2024 permintaan tenaga kerja tertinggi terjadi pada lulusan diploma yang diprediksi mencapai 355 orang dan universitas sebanyak 326 orang.

Diurutkan selanjutnya permintaan dari tenaga kerja lulusan SMTA Kejuruan sebanyak 319 orang.

Jumlah permintaan tenaga kerja tersebut diperkirakan akan terus meningkat dengan asumsi terus bertambahnya investasi di KEK MBTK. Hingga tahun 2028, permintaan lulusan diploma akan meningkat hingga 3.547 orang pada skenario moderat. Sementara permintaan lulusan universitas diperkirakan akan mencapai sebesar 3.263 orang dan lulusan SMTA kejuruan sebanyak 3.192 orang.

Jika dilihat struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan maka KEK MBTK akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Tentu hal tersebut berkaitan dengan karakteristik perusahaan yang akan masuk ke KEK MBTK sebagian besar adalah industri pengolahan khususnya pada komoditas kelapa sawit. Kompetensi yang dibutuhkan tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja di sektor *on-farm* kelapa sawit. Terlihat dari rendahnya permintaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah (SMTP ke bawah) di KEK MBTK yang hanya sebesar 9,4 persen di tahun 2024. Karakteristik ini masih belum sejalan dengan struktur penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur yang masih didominasi oleh tamatan SMTP ke bawah sebesar 48,33 persen. Jelas ini menjadi tantangan dalam menyediakan calon tenaga kerja yang dapat masuk ke KEK MBTK.

**Tabel 5.2 Skenario Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KEK MBTK
(Asumsi Moderat)**

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Tahun	Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK MBTK						
	SD dan SD ke Bawah	SMTSP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	DIPLOMA	UNIVERSITAS	JUMLAH
2024	28	106	284	319	355	326	1,419
2025	106	399	1,064	1,197	1,330	1,224	5,320
2026	177	665	1,773	1,995	2,217	2,039	8,867
2027	248	931	2,483	2,793	3,103	2,855	12,413
2028	284	1,064	2,837	3,192	3,547	3,263	14,187

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

Selanjutnya, dokumen ini juga menyajikan analisis proyeksi permintaan tenaga kerja di KEK MBTK berdasarkan jabatan. Berdasarkan Tabel 5.3, terlihat bahwa jabatan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan adalah Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi. Pada tahun 2024 jumlah permintaannya diproyeksi sebesar 247 orang dan pada 2028 meningkat hingga mencapai 2.473 orang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan KEK MBTK yang akan menjadi pusat agroindustri di Kalimantan Timur. Selanjutnya banyak juga dibutuhkan jabatan lain seperti teknisi dan asisten profesional karena dibutuhkan melakukan *maintenance* pada mesin-mesin industri.

Selain jabatan tersebut, permintaan yang tinggi masih terjadi pada pekerja kasar dengan permintaan di tahun 2024 sebanyak 236 orang. Hingga tahun 2028, masih akan terjadi peningkatan hingga sebanyak 2.365 orang. Kondisi tersebut dikarenakan pengembangan KEK MBTK

masih menyesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur yang Penduduk Usia Kerjanya sebesar 54,7 persen masih berpendidikan rendah. Secara lebih lengkap, proyeksi permintaan tenaga kerja berdasarkan jabatan di KEK MBTK ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Di KEK MBTK (Asumsi Moderat)

Tahun	Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja di KEK MBTK									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
2024	43	94	242	99	148	88	247	221	236	1,419
2025	161	353	906	372	555	328	927	830	887	5,320
2026	269	589	1,510	620	925	547	1,545	1,384	1,478	8,867
2027	376	824	2,114	868	1,295	766	2,164	1,938	2,069	12,413
2028	430	942	2,416	992	1,480	875	2,473	2,215	2,365	14,187

1 Manajer; 2 Profesional; 3 Teknisi dan Asisten Profesional; 4 Tenaga Tata Usaha; 5 Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan; 6 Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 7 Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi; 8 Operator dan Perakit Mesin; 9 Pekerja Kasar

Sumber: Hasil Perhitungan INDEF (2023)

5.3. Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja di KEK MBTK

KEK MBTK menjadi salah satu KEK yang awal ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam perjalanannya pertumbuhannya tergolong lambat. Terdapat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KEK MBTK. Lokasi yang jauh dengan pusat kota ditambah lagi waktu tempuh yang lama menjadi salah satu penghambat berkembangnya KEK MBTK. Namun, dalam mewujudkan pemenuhan permintaan tenaga kerja, KEK MBTK menghadapi sejumlah tantangan mulai dari penyiapan tenaga kerja dari sisi jumlah kuantitas hingga

penyiapan kompetensi dan keahlian tenaga kerja agar sesuai dengan permintaan investor (tenant) di KEK MBTK. Beberapa tantangan dalam pemenuhan tenaga kerja di KEK MBTK diantaranya:

Terdapat permasalahan kelembagaan karena pada awal pengajuan terdapat tiga pemegang saham tetapi hanya satu yang aktif yaitu dari perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Pada Mei tahun 2021 dilakukan perbaikan dan pengalihan saham baru dapat selesai di Februari tahun 2022. Hal tersebut membuat perkembangan KEK MBTK jalan di tempat hingga 7 tahun. Saat ini mulai kembali bergerak dengan tambahan 1 perusahaan lagi yang akan masuk ke KEK MBTK.

Kondisi infastruktur pelabuhan yang mengalami kerusakan di salah satu sisinya. Fasilitas IPAL dan pengelolaan sampah saat ini belum ada. Amdal pelabuhan masih dalam proses karena akan diubah fungsinya menjadi pelabuhan multipurpose. Belum lengkapnya fasilitas pendukung yang ada di dalam kawasan menjadikan daya tarik KEK MBTK di mata investor masih rendah.

Investor yang ingin masuk juga sering menanyakan terkait ketersediaan dari sisi hiburan dan sisi tenaga kerja terkait keberadaan universitas terdekat. Sedangkan di Kabupaten Kutai Timur saat ini hanya tersedia 1 sekolah tinggi. Jurusan yang tersedia pun masih bersifat *on-farm* belum pada agroindustri. Hal tersebut membuat para investor mempertimbangkan kembali untuk merealisasikan investasinya. Hal ini tentu memberikan efek domino pada stagnansi permintaan tenaga kerja di KEK MBTK.

Pelatihan yang dilakukan oleh Distransnaker saat ini juga belum sinkron untuk masuk ke dalam KEK MBTK. Belum terlihat potensi lowongan dan keahlian yang dibutuhkan di KEK MBTK membuat pelatihan yang dilakukan masih diperuntukan untuk pertambangan.

Kualitas lulusan SMK yang ada di Kabupaten Kutai Timur juga sering kalah bersaing dengan lulusan SMK dari luar khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan pemberian pelatihan juga pada guru-guru SMK agar meng-update pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas alumni SMK di Kabupaten Kutai Timur.

PUSRENAKER

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Sejak ditetapkan sebagai KEK pada tahun 2014, realisasi investasi yang terakumulasi hingga triwulan III 2023 baru mencapai Rp98,2 miliar atau 0,27 persen dari target pada 2025. Rata-rata pertumbuhan investasi di KEK ini juga masih relatif rendah yakni sebesar 0,03 persen. Belum optimalnya realisasi investasi di KEK MBTK berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga triwulan III 2023, penyerapan tenaga kerja di KEK ini hanya mencapai 169 orang atau sebesar 0,003 persen dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 55.700 orang.
2. Berdasarkan hasil analisis dampak pembangunan KEK MBTK terhadap perekonomian, maka ketika terjadi pembangunan KEK (yang diasumsikan dengan tingkat investasi), akan memberikan dampak terhadap bertumbuhnya ekonomi di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor yang terkait dengan kegiatan utama di KEK, namun juga pada sektor lainnya. Sektor ekonomi yang terdampak tumbuh paling tinggi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Dilanjutkan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan; sektor real estate, serta sektor pengadaan listrik dan gas.

3. Pembangunan KEK MBTK juga akan berdampak terhadap kesempatan kerja sektoral. Dampak perluasan kesempatan kerja yang paling besar terjadi pada sektor sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 0,11 persen. Selanjutnya diikuti oleh serapan tenaga kerja pada sektor jasa perusahaan dan sektor jasa keuangan serta asuransi sebesar 0,10 persen. Sektor industri pengolahan menempati urutan keempat dengan peningkatan 0,06 persen. Hal tersebut diakibatkan masih belum optimalnya KEK MBTK karena hanya ada 1 perusahaan yang telah melakukan pembangunan di dalam KEK MBTK.
4. Berdasarkan hasil proyeksi permintaan tenaga kerja, maka pada 2024 diperkirakan penyerapan tenaga kerja yang terjadi akan mencapai 688 orang (skenario low) dan 860 orang (skenario high). Kemudian pada tahun 2028, proyeksi permintaan tenaga kerja dengan skenario rendah sebanyak 6.880 orang, kemudian dengan skenario tinggi sebanyak 12.040 orang. Namun, peningkatan pada skenario optimis ini masih juga belum bisa mencapai target tenaga kerja 55,700 orang di dalam masterplan.
5. Permintaan tenaga kerja menurut pendidikan di KEK MBTK selama lima tahun mendatang diperkirakan akan didominasi oleh tenaga kerja lulusan diploma, universitas, dan SMTA Kejuruan. Sedangkan permintaan tenaga kerja yang berasal dari lulusan SD dan SMTP relatif rendah.
6. Jika dilihat struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan maka KEK MBTK akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan

menengah. Sementara permintaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah (SMTP ke bawah) di KEK MBTK hanya mencapai 9,4 persen di tahun 2024. Karakteristik ini jelas berbeda dengan struktur penduduk yang bekerja di Kabupaten Kutai Timur, dimana 48,33 persen penduduk yang berkerja adalah tamatan SMTP ke bawah.

7. Permintaan tenaga kerja di KEK MBTK menurut jabatan selama lima tahun mendatang diproyeksikan akan didominasi oleh kebutuhan pada jabatan Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan ybdi sebesar 17,4 persen dari total proyeksi permintaan di tahun 2028. Permintaan pekerja kasar di KEK MBTK juga masih cukup tinggi sekitar 16,67 persen.

6.2. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan dalam dokumen ini, diantaranya:

1. Dalam jangka pendek, KEK MBTK masih dalam tahap optimalisasi investasi maka perlu upaya untuk dapat mengoptimalkan investasi di KEK MBTK.
2. Dalam kaitannya dengan strategi penyiapan tenaga kerja maka perlu adanya pengembangan LMS (Learning Management System). Lulusan SMTA Kejuruan juga dapat diberikan *short course* sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh investor.

3. Pengembangan sistem informasi pasar kerja juga perlu dilakukan di KEK MBTK. Perlu upaya peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan kompetensi di sekitar KEK MBTK, masifikasi sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan industri, memperkuat dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK)
4. Memperbanyak SMTA kejuruan dan pendidikan tinggi dengan kurikulum yang sesuai dengan potensi KEK MBTK. Selain itu Perlu ada koordinasi yang baik antara stake holder terkait.
5. Mengembangkan SKKNI berbasis kebutuhan dunia usaha (demand based), dengan target pelaksanaan jangka pendek.
6. Mengembangkan kurikulum pelatihan yang link and match, melakukan harmonisasi dini dengan pelaku usaha dan calon investor untuk mempersiapkan pelatihan dan mengembangkan program pelatihan peningkatan produktivitas.
7. Mengembangkan kurikulum pelatihan tingkat teknisi dan ahli, dengan target pelaksanaan jangka pendek.
8. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP dan institusi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- (2009). *Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.*
- (2020). *Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2022). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2021.* Jakarta: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2023). *Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2022.* Jakarta: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2021). *Peraturan Pemerintah Indonesia No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.*
- Mirzayaputra, I. (2021). *Pengembangan Wilayah.* Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Undang Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- Szajnowska-Wysocka, A. (2009). Theories of Regional and Local Development- A Bridge Review. *Bulletin of Geography Socio-Economic Series No.12/2009.*
- Soedarso, B. (2001). Pengembangan Promosi dan Investasi Kawasan (Teritorial Marketing) Sebagai Wujud Pemanfaatan Ruang untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilaya. *Jurnal Estat Vol. 3 No. 1 .*
- Porter, M. E. (March-April 1990). The Competitive Advantage of Nations. *Harvard Business Review.*

Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. *PWE, Warszawa*, p. 37–49.

Medeiros, E. (2022). Strategic-Based Regional Development: Towards a theory of everything for regional development? *European Journal of Spatial Development*.

UNCTAD. (2019). *World Investment Report 2019: Special Economic Zones*. New York: United Nations Publications.

Aggarwal, Aradhna - ADB. (2022). *Special Economic Zones in The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*. Philippines: Asian Development Bank.

PUSRENAKER

PUSRENAKER